



**PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN**

LKJIP LAPORAN KINERJA TAHUNAN

***Tahun
2024***

**Jln.Syarifuddin Yoes
No.39 Sepinggan**

Balikpapan Kalimantan Timur

Telp : (0542) - 8520024

Email : balikpapan.dilmil07@gmail.com

Website : www.dilmil-balikpapan.go.id



KATA PENGANTAR

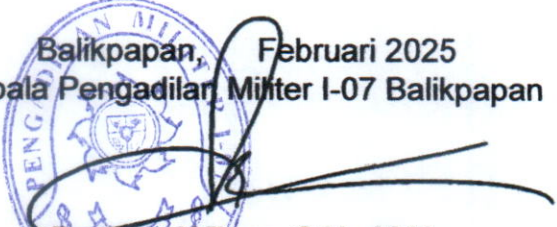


Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat diselesaikan dan disajikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini juga memuat pelaporan kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan atas pencapaian output kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Adapun beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Balikpapan, Februari 2025
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2020 – 2024.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang secara umum diharapkan dapat dicapai sebagai berikut:

- Pertama: Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi dan,
- Kedua: Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran **Pertama** adalah Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, **Kedua** adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dan **Ketiga** adalah Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Kesekretariatan sebagai Supporting Unit untuk mendukung pelaksanaan Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian untuk melaksanakan pemberian dukungan dibidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Dengan tujuan sasaran yang **Keempat** adalah Terwujudnya pelayanan sekretariat pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku.

Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 (enam) indikator kinerja dan target kinerja sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan atau Perjanjian Kinerja Tahun 2024 rata-rata persentase capaian kinerja mencapai 105,15% (seratus lima koma lima belas persen).

Guna mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengusulkan program yang dituangkan di dalam DIPA sebagai berikut:

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- b. Program Dukungan Manajemen.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	108,6
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	111
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	101
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN: 105,15%		

Tabel 1: Tabel Pencapaian Kinerja Keseluruhan

FAKTOR PENDUKUNG:

Capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan secara keseluruhan pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai capaian seluruh sasaran strategis sebesar 105,15% (seratus lima koma lima belas persen) dari keseluruhan sasaran strategis yang ada, seluruh nilai capaiannya lebih dari 100% (seratus persen) dan memenuhi target yang telah ditentukan.

Saat ini reformasi birokrasi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berlangsung dengan sangat baik. Hal tersebut berdampak pada pencapaian target kinerja tersebut yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di dukung oleh peningkatan kinerja Hakim dan Panitera serta kinerja aparatur non teknis pengadilan sehingga terpenuhinya target kinerja tersebut.

Pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2024 sebesar 108,6% (seratus delapan koma enam persen). Rincian capaian kinerja Sasaran Strategis I tersebut tergambar pada tabel capaian kinerja berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS I			
	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,3%
2.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum Banding	75%	92,31%	124%
3.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum Kasasi	85%	86,54%	101,81%
4.	Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	95%	98%	103,16%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS I: 108,6 %				

Tabel 2: Tabel Sasaran Strategis I

Pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2024 sebesar 100% (seratus persen). Rincian capaian kinerja Sasaran Strategis II tersebut tergambar pada tabel capaian kinerja berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS II			
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS II : 100 %				

Tabel 3: Tabel Sasaran Strategis II

Pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada tahun 2024 sebesar 111% (seratus sebelas persen). Rincian capaian kinerja Sasaran Strategis III tersebut tergambar pada tabel capaian kinerja berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS III			
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%	100%	111%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS III : 111 %				

Tabel 4: Tabel Sasaran Strategis III

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2024 adalah sebesar 102%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS IV			
	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku			
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	97%	99,50%	102,58%
2.	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98%	98%	100%
3.	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98%	98%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS IV : 101 %				

Tabel 5: Tabel Sasaran Strategis IV

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	8
D. Isu Strategis	9
E. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Keuangan.....	130
BAB IV PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen Keempat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam Pasal 3 Undang - Undang tersebut dinyatakan bahwa asas - asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan negara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan juga menggunakan dana APBN. Baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan juga menggunakan dana APBN, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP).

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pelaksana Badan peradilan Militer yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan semenjak tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI mempunyai kedudukan yang kuat.



Foto Tampak Depan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 Ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sejak tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (MABES TNI) Ke Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 serta berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk

- 2 (dua) Provinsi yaitu:
 - a. Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Provinsi Kalimantan Utara
- 4 (empat) Kota yaitu:
 - a. Kota Samarinda
 - b. Kota Balikpapan
 - c. Kota Bontang
 - d. Kota Tarakan
- 5 (lima) Kabupaten terdiri dari:
 - a. Kabupaten Kutai Timur
 - b. Kabupaten Berau
 - c. Kabupaten Bulungan
 - d. Kabupaten Malinau

e. Kabupaten Nunukan

2. Tugas Pokok

Mengenai justisiabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinasi aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal.

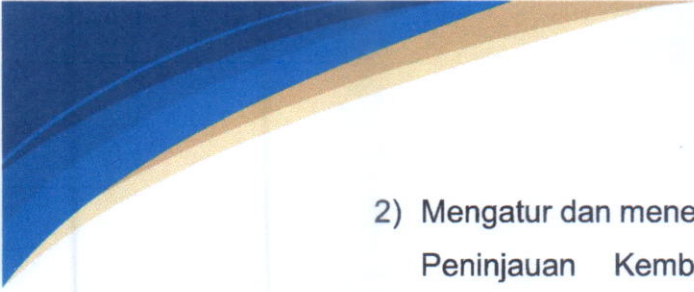
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang - undangan.

3. Fungsi

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, di bidang fungsi teknis yudisial bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Fungsi teknis tersebut antara lain:

a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni:

- 1) Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwaanya adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang - undangan menjadi wewenang).

- 
- 2) Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
- b. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan kepada Jajarannya tentang teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
 - c. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan internal dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan dan administrasi umum.
 - d. **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan fungsi lainnya sesuai kewenangan dan undang-undang.
 - e. Fungsi lainnya, yakni dapat mengadakan pelayanan, penyuluhan hukum dan memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan cara keterbukaan dan transparansi informasi peradilan sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah - kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
- 2) Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
- 3) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
- 4) Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Militer di dasarkan pada PERMA Nomor 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan dan PERMA Nomor 01 tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang perubahan atas PERMA Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan disusun sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan:

- 1) Kepala Pengadilan Militer
- 2) Wakil Kepala Pengadilan Militer

2. Unsur Kepaniteraan:

Panitera membawahi antara lain:

- 1) Panitera Muda Pidana.
- 2) Panitera Muda Hukum.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

- 1) Panitera Pengganti
- 2) Pranata Peradilan

3. Unsur Kesekretariatan

Sekretariat membawahi Sub Bagian antara lain :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP).
- 2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- 3) Sub Bagian Umum dan Keuangan.

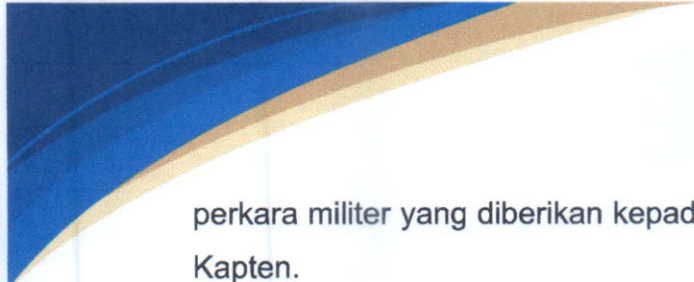
- 1) Fungsional Arsiparis.
- 2) Fungsional Pustakawan.
- 3) Fungsional Pranata Komputer.
- 4) Fungsional Bendahara.

1) Jabatan Fungsional Kelompok Hakim Militer yang disingkat Pokkimmil.

[illegible]

D. Isu Strategis

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN



perkara militer yang diberikan kepadanya mulai dari pangkat Prajurit sampai dengan Kapten.

Peran strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, serta memberikan pelayanan dan penerangan/pembinaan hukum di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya,, termasuk di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah:

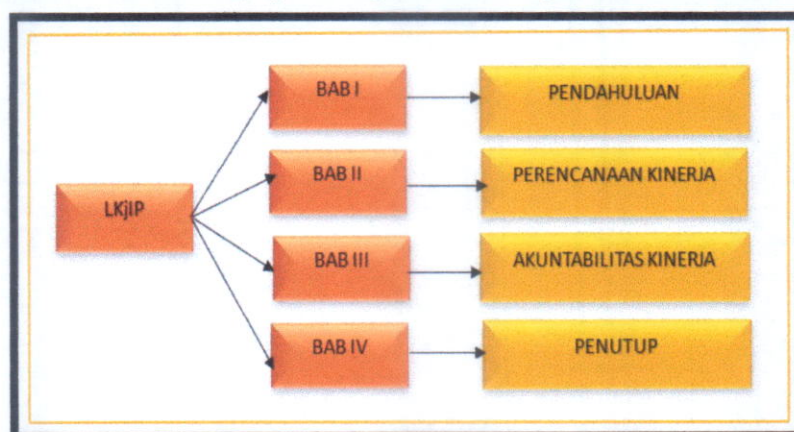
1. Produktifitas penyelesaian perkara.
Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Militer I-07 Balikpapan setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan.
2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
3. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak terjadi sampai tingkat pertama tetapi memicu para pihak melakukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.

5. Masih dijumpai permasalahan Sumber Daya Manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang excellent (seperti: independency, integrity, akuntability, resposibility, transparanty, impartial,dan equality) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.
6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.

E. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya sebagai berikut:

Bagan Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi, kedudukan, wewenang dan fungsi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan mengenai Rencana Strategis, Tujuan strategis, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Rencana Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dan Penetapan Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- 5) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- 
- 6) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
 - 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran DIPA yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV

Penutup

Menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2024 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan beserta strategis yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020-2024, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi, Misi dan Motto

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita - cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Adapun Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang Agung”

Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

a) Pengertian secara kelembagaan :

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota dan/ atau ibu kota daerah setingkat provinsi, wilayah hukumnya termasuk Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

b) Pengertian secara organisasional :

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan wilayah hukumnya yang terdiri dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan itu sendiri sebagai pengadilan tingkat pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala), Kelompok Hakim Militer, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berada dibawah Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut adalah :

1. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah pelaksana badan peradilan dilingkungan peradilan militer tingkat pertama yang berkedudukan di Balikpapan yaitu di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang wilayah hukumnya meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran.

b. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel.
- b) Keterjangkauan pelayanan badan peradilan.
- c) Keterjangkauan pelayanan badan peradilan.

c. Motto

Motto Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah: **"RADJA"**

- R** : Responsif
A : Akuntabel
D : Disiplin
J : Jujur
A : Adil

2. Tujuan

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian



Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2010 dan telah direvisi dengan Nomor Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2020-2024 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Kesekretariatan sebagai Supporting Unit untuk mendukung pelaksanaan Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian untuk melaksanakan pemberian dukungan dibidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan uraian secara umum sebagai berikut :

- 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan Peradilan untuk mencari keadilan.

- 3) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana Tingkat pencapaiannya (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Kemudian, dengan adanya tujuan tersebut ditetapkanlah sasaran strategis yaitu:

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.**
 - a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
 - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
 - d. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.
- 2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.**
 - a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.**
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
- 4) Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku.**
 - a. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

- b. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- c. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020–2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		d. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
Setiap pencari keadilandapat menjangkau adan peradilan untuk mencari keadilan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	a. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

		b. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana
		c. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan

Tabel Deskripsi hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

4. Budaya Kerja

Budaya kerja yang tidak boleh di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Terlambat masuk kantor.
- b. Tidak ikut apel.
- c. Sering tidak masuk kantor tanpa alasan.
- d. Bekerja tanpa program.
- e. Pulang sebelum waktunya.
- f. Sering meninggalkan kerja tanpa alasan sah.
- g. Bekerja tanpa tanggung jawab.
- h. Pekerjaan terbengkalai.
- i. Berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut.
- j. Tidak bertatakrama dan bersopan santun.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan RPJM 2020–2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020 – 2024

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepa waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Penilaian kepuasan dari para stakeholder	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Indikator Kinerja Kesekretariatan

Adapun Indikator kinerja bagian Kesekretariatan sebagai Supporting unit adalah sebagai berikut :

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
4.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	a. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan
			b. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana
			c. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan

B. Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam rencana kinerja tahunan. Adapun untuk reviu rencana kinerja tahunan 2024 sebagai berikut:

Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85 %
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	90%
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	a. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi, evaluasi dan dokumentasi serta informasi dan statistik serta pemantauan pelaporan	97%
		b. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98%
		c. Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah membuat Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan RPJM 2020 - 2024. Adapun Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85 %
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90 %
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi, evaluasi dan dokumentasi serta informasi dan statistik serta pemantauan pelaporan	97%
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98%
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98%

Capaian Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105,3%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	92,31%	124%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	86,54%	101,81%
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	98%	103,16%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%	100%	111%
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	97%	99,50%	102,58%
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98%	98%	100%
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98%	98%	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Pengukuran Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$

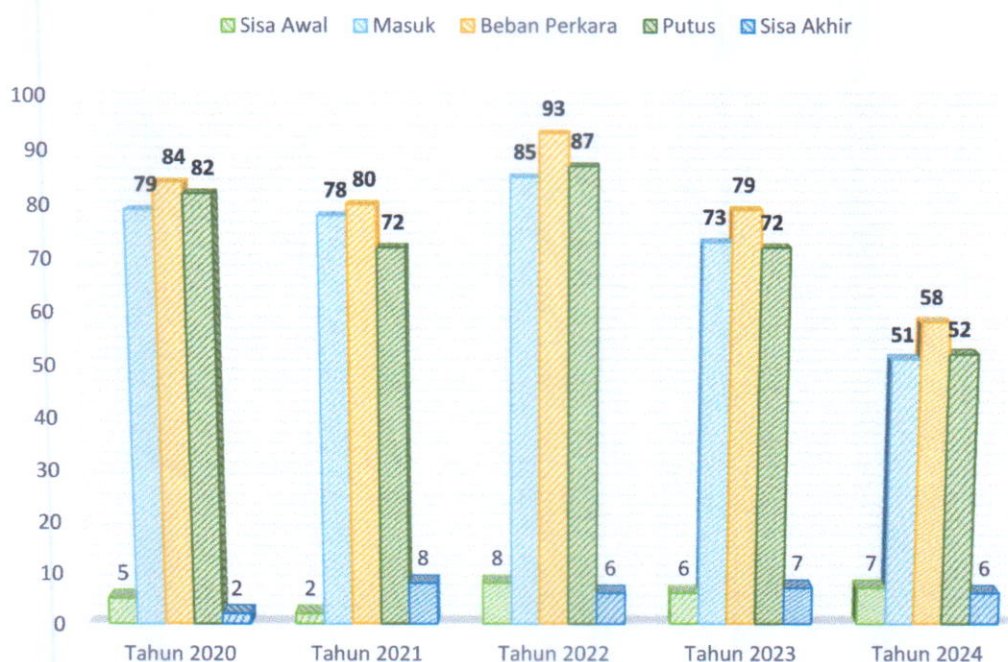
No	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105,3%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	92,31%	124%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	86,54%	101,81%
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	98%	103,16%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%	100%	111%
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	97%	99,50%	102,58%
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98%	98%	100%
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98%	98%	100%

Perbandingan Keadaan Perkara Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2024

Tahun	Sisa Awal	Masuk	Beban Perkara	Putus	Sisa Akhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2020	5	79	84	82	2	-
2021	2	78	80	72	8	-
2022	8	85	93	87	6	-
2023	6	73	79	72	7	-
2024	7	51	58	52	6	-

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2024

GRAFIK PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024



Analisi Akuntabilitas

Pada tahun anggaran 2024, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya di ukur dengan mengaplikasikan 9 (sembilan) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan semua sasaran telah di capai dengan baik sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan.

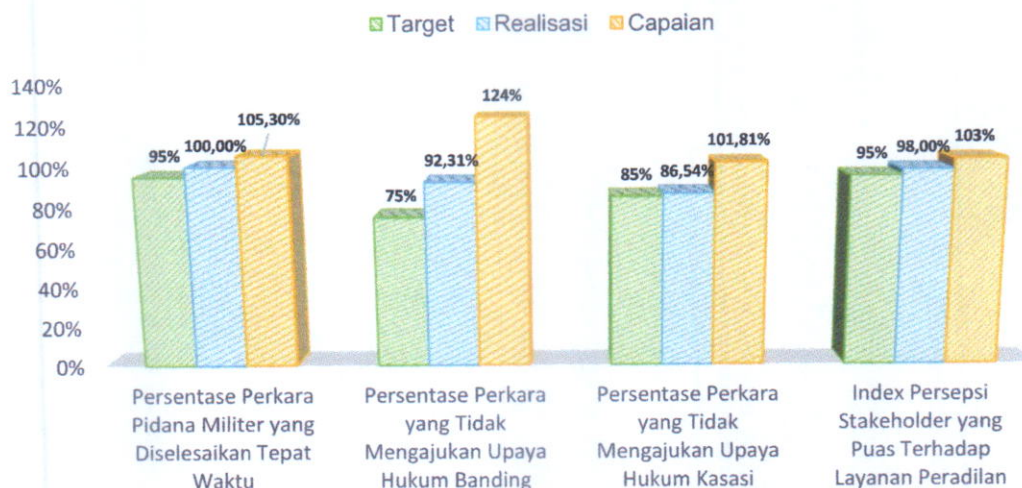
SASARAN 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diukur dengan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran teknis yudisial ini, pada tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,3%
2.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum Banding	75%	92,31%	124%
3.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum Kasasi	85%	86,54%	101,81%
4.	Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	95%	98 %	103,16%

GRAFIK SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL TAHUN 2024



Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan Tepat Waktu.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan 2024 Pengadilan I-07 Balikpapan diuraikan bahwa jumlah perkara yang ditangani sebanyak 58 perkara (Sisa tahun 2023 sebanyak 7 perkara, Perkara Pidana Kejahatan Masuk 43 perkara dan Perkara Pidana Pelanggaran Masuk 8 perkara) dan diputus 52 perkara (Perkara Pidana Kejahatan sebanyak 44 perkara dan Perkara Pidana Pelanggaran sebanyak 8 perkara). Sehingga sisa perkara tahun 2024 sebanyak 6 (enam) perkara. Dapat dilihat dari tabel data keadaan perkara pada tahun 2024 sebagai berikut :

Berikut tabel data keadaan perkara pada tahun 2024 sebagai berikut:

Keadaan Perkara Tahun 2024

Bulan	Sisa awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	7	4	4	7
Februari	7	5	5	7
Maret	7	3	4	6
April	6	5	0	11
Mei	11	0	4	7
Juni	7	7	7	7
Juli	7	4	2	9
Agustus	9	4	8	5
September	5	0	5	0
Oktober	0	5	0	5
Nopember	5	6	4	7
Desember	7	0	1	6
Jumlah		43	44	

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2024

Target penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) pada tahun 2024 telah terpenuhi, dengan Jumlah sisa perkara Pidana Militer tahun 2023 adalah 7 (tujuh) perkara, sedangkan jumlah perkara masuk tahun 2024 berjumlah 43 (empat puluh tiga) perkara, sehingga jumlah perkara Pidana Militer yang ditangani pada tahun 2024 adalah berjumlah 50 (lima puluh) perkara dan perkara Pidana Militer yang diputus sejumlah 44 (empat puluh empat) perkara dan semuanya tepat waktu. Dengan demikian persentase realisasi penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2024 mencapai 100% (seratus persen). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja

Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2024 melebihi target tahunan dengan capaian persentase 105,3% (seratus lima koma tiga persen). Berikut tabel dan grafik pencapaian target kinerjanya tahun 2024 sebagai berikut :

Berikut tabel dan grafik pencapaian target kinerjanya tahun 2024 sebagai berikut:

KEADAAN PERKARA PIDANA MILITER YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU TAHUN 2024

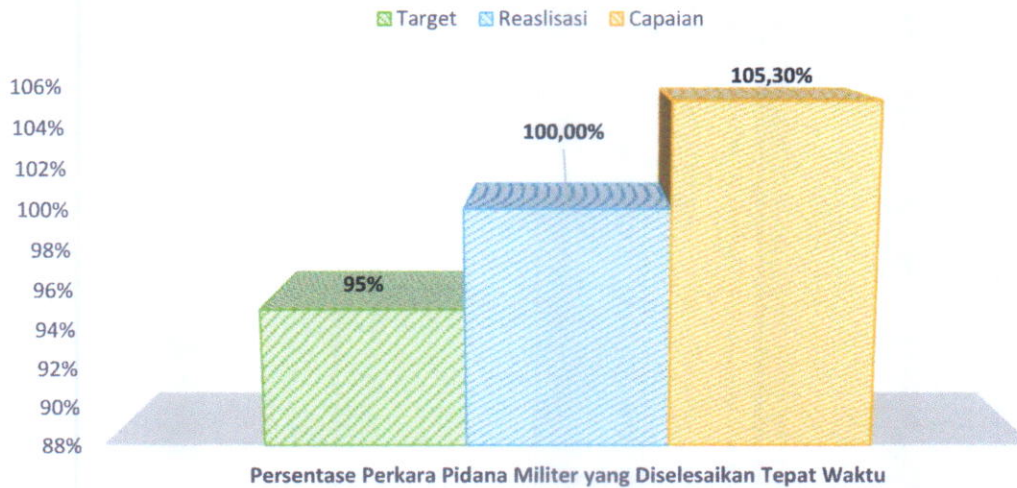
Jenis Perkara Pidana	Perkara yang ditangan	Perkara Yang diputus	Waktu penyelesaian perkara		Ket
			1 s.d 5 bulan	> 5 bulan	
Pidana Kejahatan	50	44	44	0	Sisa : 6 Dicabut :0
Pidana Pelanggaran	8	8	8	0	-

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2024

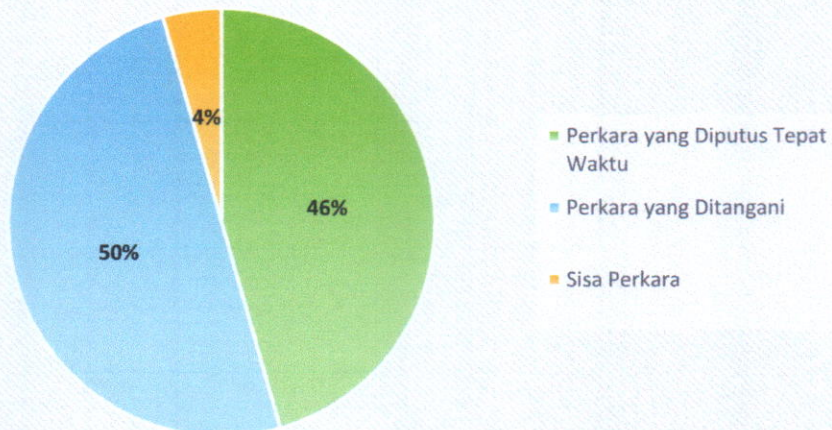
Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu** pada tahun 2024 dapat terpenuhi sebesar 105,3%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,3%

GRAFIK PERSENTASE PERKARA PIDANA MILITER YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2024



Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024



Berdasarkan data dan penjelasan tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 telah tercapai dengan persentase capaian 105,3% (Seratus lima koma tiga persen). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 telah terpenuhi dengan target 95% (Sembilan puluh lima persen).

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020.

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu** tahun 2024 berbanding sama dengan pencapaian target kinerja Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan melebihi target yang ditentukan sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja															Keterangan
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	97,56%	102,7%	95%	90%	95,74%	95%	93,55%	98,48%	95%	100%	105,3%	95%	100%	105,3%	Pencapaian kinerja melebihi target 95%

Tabel Pencapaian Target Kinerja

**GRAFIK PERBANDINGAN
PENYELESAIAN PERKARA YANG
DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN
2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024**



	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah Beban Perkara	84	80	93	79	58
Perkara putus	82	72	87	72	52
Sisa Perkara	2	8	6	7	6

- c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada indikator kinerja **Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu** pada tahun 2024 telah mencapai Target Jangka Menengah (95%) dengan capaian realisasi 96,23% (sembilan puluh enam koma dua puluh tiga persen). Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	97,56 %	90 %	93,55 %	100 %	-	95%	Realisasi 5 tahun = (97,56%+90%+93,55%+ 100%+100%) /5 = 96,23%

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pada indikator tersebut berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut menjadi acuan dan standar nasional bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam penyelesaian perkara. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2014 tersebut disebutkan pada point 1 (satu) bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2024 sebesar 100% sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target lebih rendah yakni sebesar 95%, perbandingan target dan realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	100%	95%	100%	105,3%	Target tercapai melebihi Target MA

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2024 melebihi target jangka menengah sebesar 105,3% (serratus lima koma tiga persen).

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi percepatan penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2024.
2. Membagi beban penyelesaian perkara yang ditangani kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secara proporsional.
3. Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, seperti salah satunya dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

**Tabel Penyelesaian Perkara sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 di
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan**

No	Tahun	1 s.d 5 bln	>5 bulan
1	2	3	4
1.	2024	52	0

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada. Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 hanya terdiri dari 5 (lima) orang Hakim Militer termasuk Kepala, 1 orang Panitera, 3 orang Panitera Pengganti, sedangkan jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana masih kosong.

Namun demikian pelaksanaan target kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

No	Kelompok Jabatan	Jabatan	Jumlah (Personel)	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.
I	Teknis	Kepala	1	TNI
		Wakil Kepala	-	-
		Pokkimmil	4	TNI
		Panitera	1	TNI
		Panmud Pidana	-	-
		Pengadmin Hukum (Staf)	-	-
		Pengadmin Reg Perkara (Staf)	-	-
		Pengelola Perkara (Staf)	2	TNI/ASN
		Analisis Perkara Peradilan (Staf)	-	-
		Panmud Hukum	-	-
		Pengadmin Hukum (Staf)	-	-
		Pengadmin Reg Perkara (Staf)	-	-
		Pengelola Data Informasi dan Hukum (Staf)	-	-
		Panitera Pengganti	3	TNI
II	Non Teknis	Sekretaris	1	TNI
		Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	ASN
		Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Staf)	-	-

	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Staf)	-	-
	Pengolah Data dan Informasi (Staf)	1	ASN
	Kasubbag Umum dan Keuangan	1	ASN (Plt)
	Penyusun Laporan Keuangan (Staf)	-	-
	Bendahara (Staf)	1	ASN
	Pengelola daftar gaji	-	-
	Pengadministrasian Keuangan	1	ASN
	Pengelola Barang Milik Negara (Staf)	-	-
	Pranata Barang dan Jasa (Staf)	-	-
	Pranata Kearsipan (Staf)	-	-
	Pengadmin Persuratan (Staf)	-	-
	Pengadmin Pustakawan (Staf)	-	-
	Teknisi Sarana dan Prasarana (Staf)	-	-
	Ajudan (Staf)	-	-
	Pengemudi (Staf)	-	-
	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	ASN
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (Staf)	-	-
	Analisis Kepegawaian	1	ASN
	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Staf)	-	-
	Pengelola Kepegawaian (Staf)	-	-

Sumber Data: Subbagian Kepegawaian dan Ortala Dilmil I-07 Balikpapan Tahun 2024

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima diantaranya diaplikasi dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dengan usaha dan kerja keras dari seluruh aparatur dan komitmen yang kuat dari seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk mendapatkan WBK. Semoga Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun yang akan datang dapat mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), walaupun Pengadilan Militer I-07 Balikpapan belum memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tetapi seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertekad dan berkomitmen untuk mewujudkannya serta selalu menjaga integritas.

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap seluruh bagian.
- 5) Pengawasan setiap Triwulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Kep Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 6) Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum Banding.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang di putus pada tahun berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan Pengadilan.

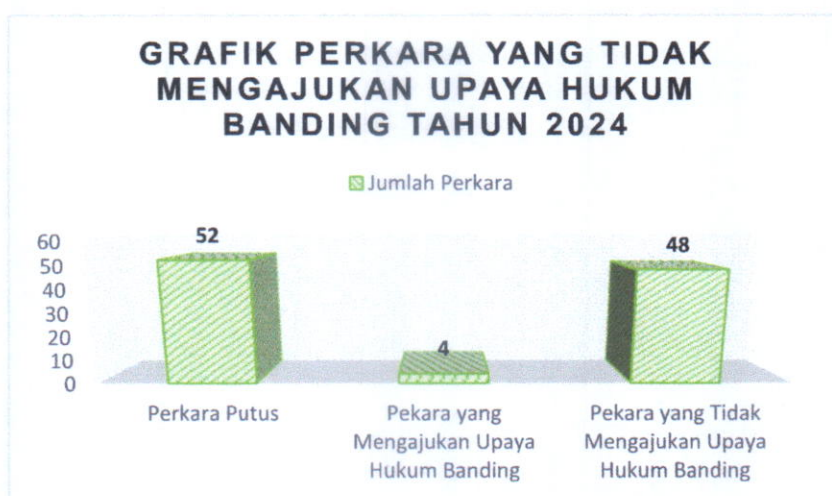
Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding** pada tahun 2024 memenuhi target sebesar 75%. Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	92,31%	124%

Tabel Perkara yang Mengajukan dan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024

Perkara Putus	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
1	2	3
52	4	48

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2024



Pada tabel dan grafik pengajuan upaya hukum Banding pada tahun 2024 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2024 adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) perkara, dari jumlah tersebut yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 4 (empat) perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, sebanyak 48 (empat puluh delapan) Perkara dengan Persentase realisasi target 92,31% (sembilan puluh dua koma tiga puluh satu persen) dan nilai capaian kinerja 124% (seratus dua puluh empat persen).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

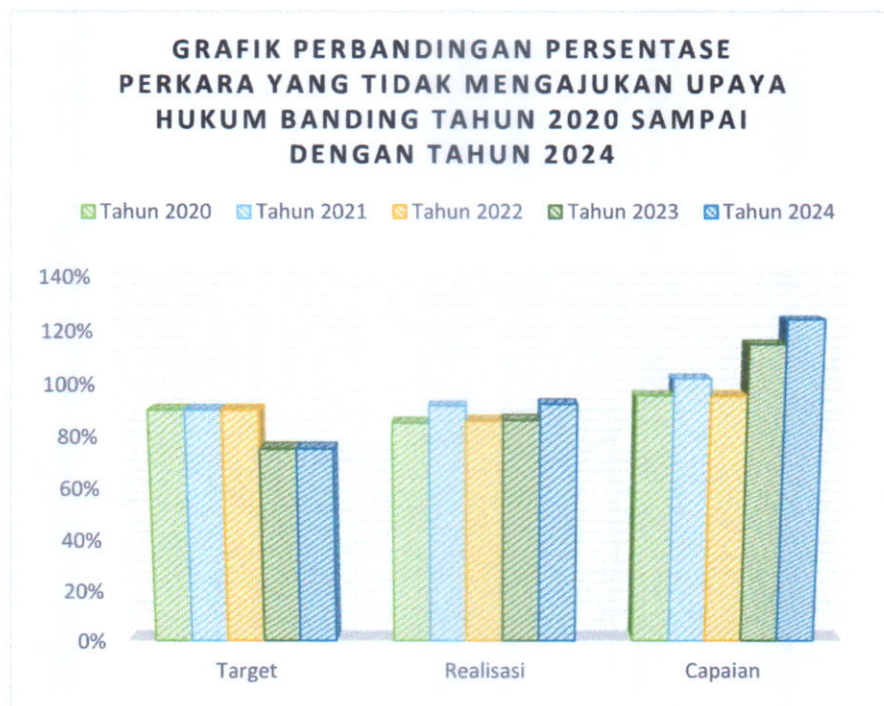
Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding** mengalami Kenaikan sebesar 6,2 % jika diperbandingkan dengan tahun 2023, jika dibandingkan dengan tahun

2022 (6,6%), Jika dibandingkan dengan tahun 2021 (0,63%) dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 (6,31%).

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	86%	91,68 %	85,71 %	86,11%	92,31%	Kenaikan 6,2% dari tahun 2023, 6,6% dari tahun 2022, 0,63% dari tahun 2021 dan 6,31% dari tahun 2020

Tabel Pencapaian Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024



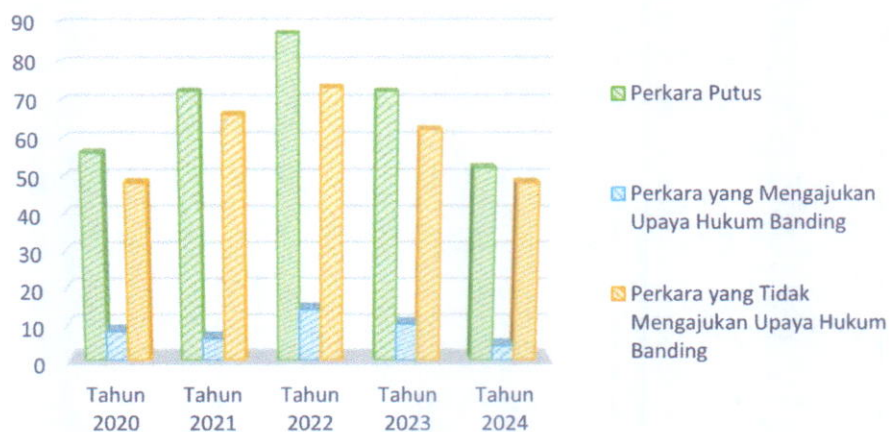
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	90%	90%	90%	75%	75%
Realisasi	85%	91,68%	85,71%	86,11%	92,31%
Capaian	95,56%	101,87%	95,23%	114,8%	124%

**Tabel Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2019
Sampai Dengan Tahun 2024**

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
1.	2.	3.	4.
2020	56	8	48
2021	72	6	66
2022	87	14	73
2023	72	10	62
2024	52	4	48

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2024

**GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA YANG TIDAK
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024**



	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Perkara Putus	56	72	87	72	52
Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	8	6	14	10	4
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	48	66	73	62	48

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada indikator kinerja **Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding** pada tahun 2024 sudah mencapai Target jangka menengah dengan capaian realisasi 88,162%. Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %	91,68 %	85,71 %	86,11 %	92,31%	75%	Realisasi 5 tahun = (85%+91,68%+85,71%+86,11%+92,31%) /5 = 88,162%

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2024 telah mencapai target tahunan dan bahkan melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan. Seperti sudah dijelaskan bahwa rasa keadilan tersebut sangat subjektif bagi para pihak yang berperkara sehingga upaya hukum Banding merupakan jalan yang di jamin oleh undang-undang untuk menguji putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya upaya hukum Banding merupakan hak bagi para pihak dalam hal ini Terdakwa dan Oditor Militer yang tidak bisa dihindari. Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja pada tahun 2024 terpenuhi bahkan melebihi persentase target kinerja jangka menengah dengan capaian 92,31% (sembilan puluh dua koma tiga satu persen).

d. Membandingkan Realisasi Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2024 sebesar 50% sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan

target lebih tinggi yakni sebesar 75%, perbandingan target dan realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	50%	75%	92,31%	124%	Target MARI dan Target Satker tercapai

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2024 telah mencapai target tahunan dan bahkan melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Membagi beban penyelesaian perkara yang ditangani kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secara proporsional.
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Namun, seperti sudah dijelaskan bahwa rasa keadilan tersebut sangat subjektif bagi para pihak yang berperkara sehingga Upaya Hukum Banding merupakan jalan yang dijamin oleh undang-undang untuk menguji putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Upaya Hukum Banding merupakan hak bagi para pihak dalam hal ini Terdakwa dan Oditur Militer yang tidak bisa dihindari.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Komposisi ketersediaan Sumber Daya Manusia

(SDM) bagian teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 hanya terdiri dari 5 (lima) orang Hakim Militer termasuk Kepala, 1 (satu) orang Panitera, dan 3 (tiga) orang Penitera Pengganti, sedangkan jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana masih kosong.

Namun demikian pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g. Analisis Program Atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 antara lain yaitu:

1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2024 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap seluruh bagian.
5. Pengawasan setiap Triwulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Kep Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
6. Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang di putus. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan Pengadilan.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

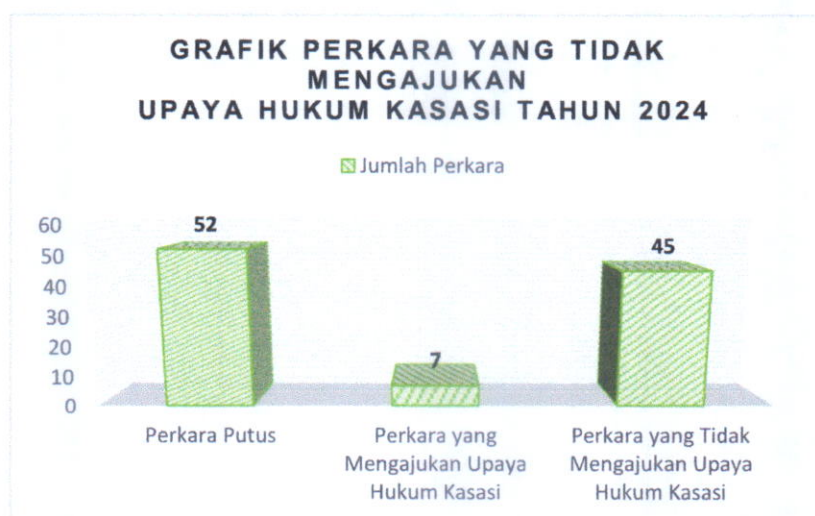
Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi** pada tahun 2024 sudah memenuhi target sebesar 85%. Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	86,54%	101,81%

Tabel Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

Perkara Putus	Perkara Kasasi	Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	2	3
52	7	45

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2024



	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Jumlah Perkara	52	7	45

Pada tabel dan grafik pengajuan upaya hukum Kasasi pada tahun 2024 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2024 adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) perkara, dari jumlah tersebut yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 7 (tujuh) perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, sebanyak 45 (empat puluh lima) perkara dengan persentase realisasi target 86,54% (delapan puluh enam koma lima puluh empat persen) dan persentase capaian kinerja sebesar 101,81% (seratus satu koma delapan puluh satu persen).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

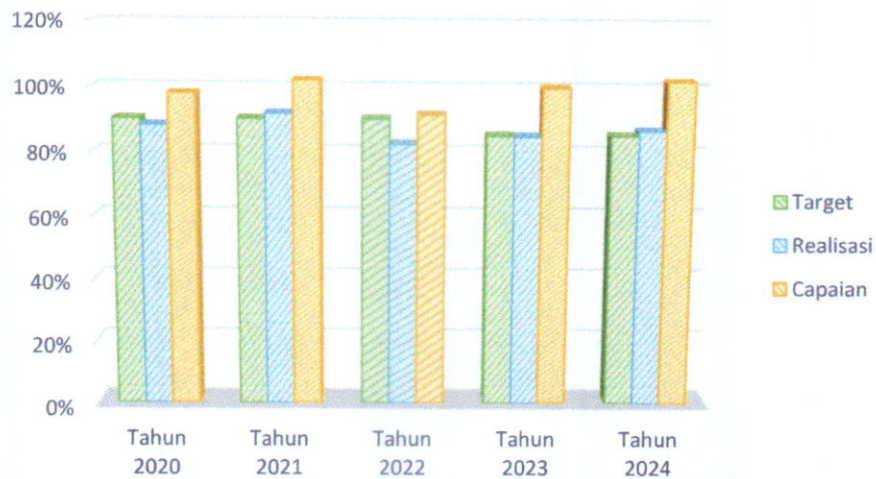
Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi** mengalami Kenaikan sebesar 1,82 % jika diperbandingkan dengan tahun 2023, jika dibandingkan dengan tahun 2022 (4,29%), Jika dibandingkan dengan tahun 2021 (5,14%) dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 (1,46%).

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

TABEL PERBANDINGAN PERKARA YANG MENGAJUKAN/YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2024 DENGAN TAHUN 2023, 2022, 2021, 2020

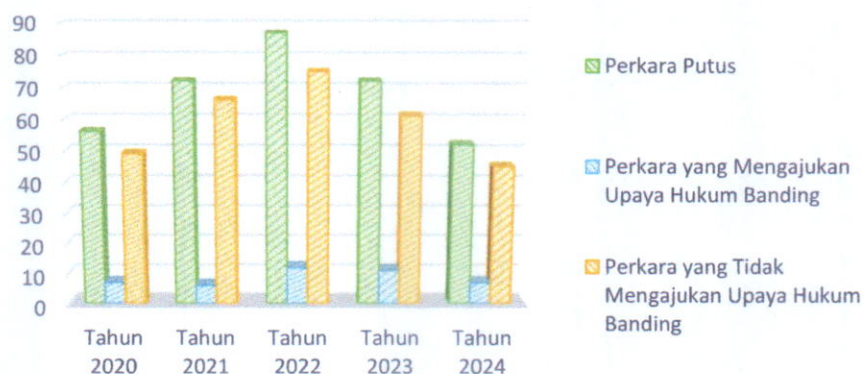
Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88%	91,68%	82,25 %	84,72%	86,54%	Kenaikan 1,82% dari tahun 2023, 4,29% dari tahun 2022, 5,14%% dari tahun 2021 dan 1,46% dari tahun 2020

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2020-2024



	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	90%	90%	90%	85%	85%
Realisasi	88%	91,68%	82,25%	84,72%	86,54%
Capaian	97,78%	101,87	91,39%	99,7%	101,81%

GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2020 - 2024



	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Perkara Putus	56	72	87	72	52
Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	7	6	12	11	7
Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	49	66	75	61	45

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah pada indikator kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2024 sudah mencapai Target jangka menengah dengan capaian realisasi 86,64%. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88 %	91,68 %	82,25 %	84,72 %	86,54	85%	Realisasi 5 tahun = (88%+91,68%+82,25 %+ 84,72%+86,54%) /5 = 86,64%

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2024 sebesar 50% sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target lebih tinggi yakni sebesar 85%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	85%	86,54%	101,81%	Target MARI tercapai

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2024 telah mencapai target tahunan dan bahkan melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Membagi beban penyelesaian perkara yang ditangani kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secara proporsional.
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Namun, seperti sudah dijelaskan bahwa rasa keadilan tersebut sangat subjektif bagi para pihak yang berperkara sehingga upaya hukum Kasasi merupakan jalan yang dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya Upaya Hukum Kasasi merupakan hak bagi para pihak dalam hal ini Terdakwa dan Oditur Militer yang tidak bisa dihindari.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Komposisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bagian teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 hanya terdiri dari 5 (lima) orang Hakim Militer termasuk Kepala, 1 orang Panitera, dan 3 orang Penitera Pengganti, sedangkan jabatan Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum masih kosong.

Namun demikian pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2024 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap seluruh bagian.
5. Pengawasan setiap Triwulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Kep Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
6. Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

3. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Pengukuran kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan kepada masyarakat dan anggota TNI

sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan. Dengan survei kepuasan masyarakat ini diperoleh index persepsi kepuasan terhadap layanan peradilan.

Survei dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulan (triwulan). Namun demikian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melaksanakan survei setiap 3 bulan (triwulan) sesuai Surat Edaran Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 360/Djmt/SE/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Metode yang digunakan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran skala Likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap sesuatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Responden survei adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.

Adapun unsur Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
3. Waktu Pelayanan.
4. Biaya/Tarif*).
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana**).
7. Perilaku Pelaksana**).
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
9. Sarana dan Prasarana.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	2	3	4	5
1.	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2.	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Babik
3.	3,0644- 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4.	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Tabel Kriteria Penilaian IKM

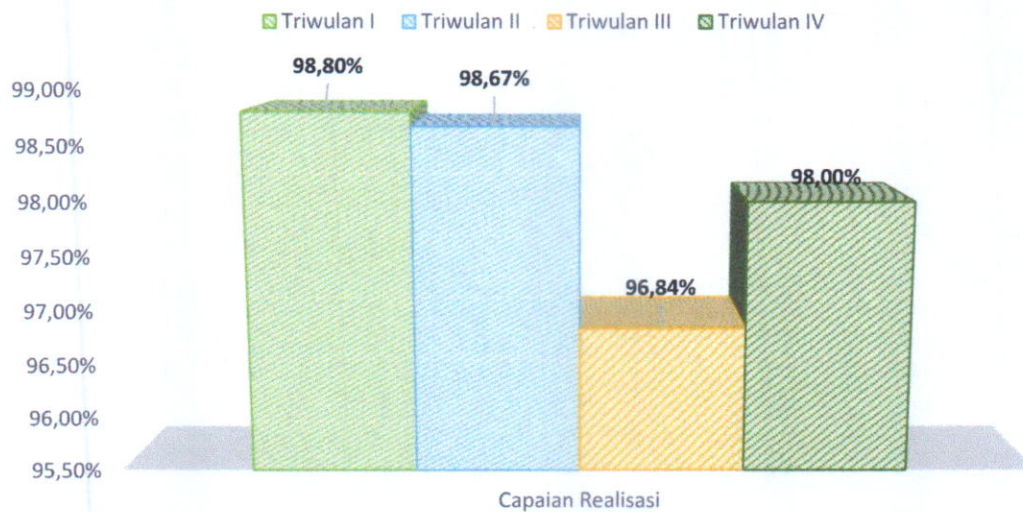
a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Tingkat capaian indikator kinerja index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada periode triwulan I, II, III dan triwulan IV tahun 2024 telah memenuhi target, rasio index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dengan mutu pelayanan “A” memuaskan. Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel realisasi per triwulan capaian target index persepsi responden/stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
		TW.I 2024	TW.II 2024	TW.III 2024	TW.IV 2024	
1	2	3	4	5	6	7
Index Persepsi stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	95%	98,80%	98,67%	96,84%	98%	103,24%

Tabel Realisasi Penilaian IKM

GRAFIK INDEX KEPUASAN MASYARAKAT PER TRIWULAN TAHUN 2024



Pada tabel dan grafik index kepuasan masyarakat tahun 2024 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa survei kepuasan masyarakat (SKM) dilaksanakan setiap triwulan, hasil index kepuasan masyarakat (IKM) pada setiap triwulan tersebut telah memenuhi target tahun 2024.

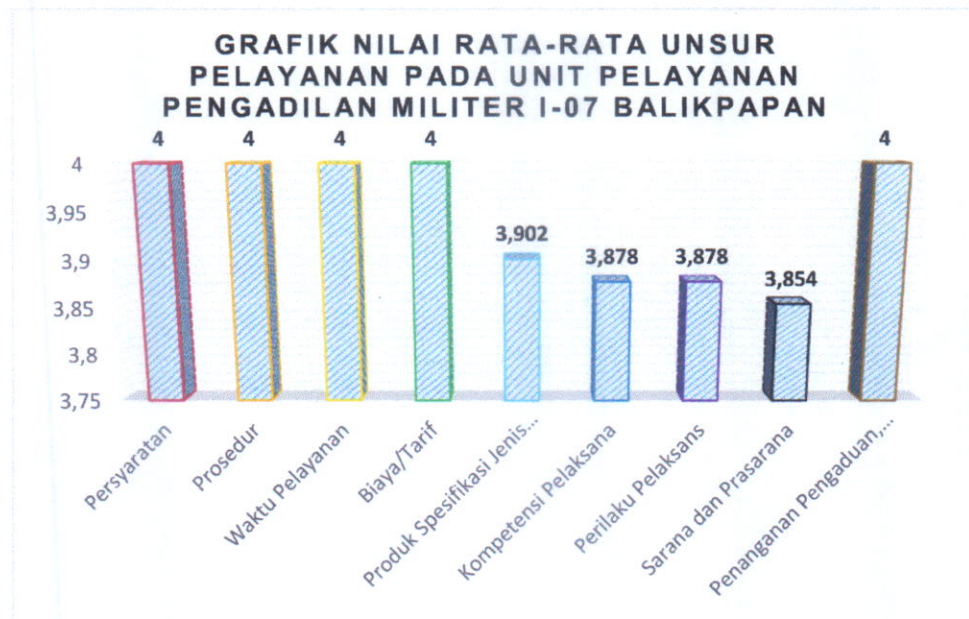
Pengukuran capaian target kinerja pada indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2024 akan diukur dengan membandingkan target dengan capaian hasil index kepuasan masyarakat (IKM) pada triwulan IV tahun 2024.

Dalam memaksimalkan kinerja sektor pelayanan public terdapat beberapa hal penting yang harus di utamakan, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh anggota TNI atau masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat di lihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan.

Berikut tabel nilai rata-rata skor dan peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran index kepuasan pengguna atau masyarakat layanan Pengadilan triwulan IV tahun 2024.

No	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori
1	2	3	4
1.	Persyaratan	4,000	Sangat Baik
2.	Prosedur	4,000	Sangat Baik
3.	Waktu Pelayanan	4,000	Sangat Baik
4.	Biaya / Tarif	4,000	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,902	Sangat Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3,878	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3,878	Sangat Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3,854	Sangat Baik
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000	Sangat Baik
Nilai Rata-Rata Tertimbang		3,906	Sangat Baik
IKM Unit Pelayanan setelah di Konversi		98 Mutu Pelayanan "A" (Memuaskan)	

Sumber Data: Laporan SKM Periode Triwulan IV Tahun 2024



Berdasarkan data dan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) unsur pelayanan semuanya memiliki kualitas penilaian yang sangat baik, namun demikian tetap memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas

layanan untuk mempertahankan dan mendapatkan nilai yang terbaik pada periode berikutnya.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Pengukuran capaian target kinerja pada indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir akan diukur dengan membandingkan capaian hasil index kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan periode triwulan IV tahun 2024 dengan capaian hasil index kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan pada triwulan IV tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan pencapaian index kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 dengan pencapaian target indikator Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan index kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan.

Pada tahun 2023 capaian index kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan sebesar 98,77 dengan mutu pelayanan "A" sedangkan pencapaian index kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan pada tahun 2024 sebesar 98 dengan mutu pelayanan "A". Berikut perbandingan pencapaian indikator Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	99,33%	97,56%	99,76%	98,77%	98%	Kenaikan 0,77% dari tahun 2023, 1,76% dari tahun 2022, 0,44% dari tahun 2021 dan 1,33% dari tahun 2020

Tabel Pencapaian Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**Tabel Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2024**

Tahun	Target IKM	Nilai IKM	Persentase Capaian
1	2	3	4
2020	95	99,33	104,56
2021	95	97,56	102,74
2022	95	99,76	105,01
2023	95	98,77	103,97
2024	95	98	103,16

Sumber Data: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Dilmil I-07 Balikpapan

**GRAFIK PERBANDINGAN INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT (IKM) TAHUN 2020 SAMPAI
DENGAN TAHUN 2024**



Berdasarkan pada tabel dan grafik diatas bahwa realisasi pencapaian target kinerja pada indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dari hasil penilaian mutu pelayanan dan nilai index kepuasan masyarakat (IKM) dibandingkan tahun 2023 dan beberapa tahun sebelumnya dengan nilai IKM tahun 2024 sebesar 98 dengan mutu pelayanan “A” (memuaskan).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2020	2021	2022	2023	2024		
Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	99,33%	97,56%	99,76%	98,77 %	98%	95%	Realisasi 5 tahun = $(99,33\%+97,56\%+99,76\%+98,77\%+98\%)/5 = 98,69\%$

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 telah melebihi target tahunan dan telah memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan. Pada tabel di atas terlihat pula bahwa capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan pada tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya telah melebihi target index kepuasan masyarakat (IKM) jangka menengah dengan nilai index kepuasan masyarakat (IKM) yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis sebesar 95 (sembilan puluh lima) mutu pelayanan "A". Dengan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 akan diupayakan capaian index mutu layanan jangka menengah akan tetap dapat terpenuhi dan tercapai pada tahun berikutnya.

Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kinerja Aparatur Pengadilan dan meningkatkan mutu pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan serta meningkatkan kompetensi Hakim, Panitera Pengganti serta aparatur

Pengadilan lainnya untuk mengikuti diklat dan pelatihan-pelatihan sehingga dapat menghasilkan produk Pengadilan yang berkualitas dan berkeadilan.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/Sek/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditetapkan bahwa nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus lebih dari 80.

Berdasarkan Keputusan Sekma tersebut target kinerja pada indikator kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2024 dengan nilai IKM sebesar 80 sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target lebih tinggi dengan nilai IKM sebesar 95, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada table sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target IKM MARI	Target IKM Satker	Realisasi IKM Satker	Capaian IKM Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%	95%	98%	103,16%	Target Nasional (MARI) tercapai

Dengan demikian realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 secara Nasional telah memenuhi target yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Terkait Index Kepuasan Masyarakat Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Secara umum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2024 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani pencari keadilan. Para Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan sudah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana didalam persidangan sehingga terwujudnya pelayanan yang prima dan berkeadilan.

Penyediaan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi skala prioritas bagi Pengadilan dalam meningkatkan pelayanan, selain itu Pengadilan harus memberikan kemudahan-kemudahan baik terkait akses pelayanan maupun akses informasi pengadilan, oleh karena itu Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membuat beberapa inovasi terkait pelayanan. Kepuasan masyarakat atau anggota TNI yang berperkara di Pengadilan dalam memperoleh informasi dan pelayanan menjadi suatu keniscayaan yang harus diwujudkan.

Dengan demikian pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik oleh penyelenggara pelayanan publik yakni Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan dipergunakan oleh unit kerja untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan layanan Pengadilan.

Beberapa faktor penyebab keberhasilan atau peningkatan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang memperoleh penilaian sangat baik antara lain:

1. Kinerja aparatur Pengadilan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya serta berpedoman pada SOP dan peraturan yang ada.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidangnya.
3. Managemant waktu yang efisien.

4. Mengintegrasikan pelayanan dari manual ke elektronik.
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
6. Terbangunnya kesadaran, pola pikir (*mainset*) dan budaya kerja dari Kadilmil, Pokkimmil dan seluruh aparatur Pengadilan.
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara berkala.

Pada dasarnya hasil nilai index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah memperoleh nilai index yang sangat baik dengan mutu pelayanan "A", namun demikian Pimpinan Pengadilan secara berkala rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait nilai unsur pelayanan yang memperoleh nilai paling rendah di antara 9 (sembilan) unsur penilaian pada survei kepuasan masyarakat. Monitoring dan evaluasi tersebut merupakan salah satu kebijakan dan solusi yang dilaksanakan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan di Pengadilan, hasil rekomendasi dari monev tersebut akan ditindaklanjuti untuk perbaikan layanan di Pengadilan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja index persepsi stakeholder yang merasa puas terhadap layanan peradilan tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Komposisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut :

- a) 5 (lima) orang Hakim termasuk Kepala.
- b) 1 (satu) orang Panitera.
- c) Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum masih kosong.
- d) 3 (tiga) orang Panitera Pengganti.
- e) 1 (satu) orang Sekretaris.
- f) 2 (tiga) orang Kasubbag, 1 (satu) orang Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan.
- g) 5 (enam) orang staff (PNS dan Bintara).
- h) 8 (delapan) orang PPNP.

Namun demikian Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Panitera yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian penanganan berkas perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dilakukan secara proporsional, Kadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja. Terbukti dengan komposisi tenaga teknis yang ada tersebut Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan dan memutus semua perkara yang ditangani tahun 2024 sebanyak 52 (lima puluh dua) perkara.

Begitu pula dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada bagian non teknis atau bagian Kesekretariatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia belum memenuhi kriteria standar jumlah pegawai pada Pengadilan Tipe A. Masih terdapat jabatan-jabatan kosong seperti jabatan Panmud Hukum, Panmud Pidana dan beberapa jabatan fungsional, analis dan jabatan pengelola yang belum terisi, sehingga tugas dan tanggung jawab jabatan yang kosong tersebut dikerjakan oleh pegawai yang menduduki jabatan lain.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) ini tidak menjadi halangan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian perkara dan tugas-tugas administrasi lainnya. Semua beban kerja dapat dibagi habis kepada Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang tersedia.

Salah satu contoh pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada yaitu seperti belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai khusus front office yang bertugas di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Untuk mengisi petugas pada area PTSP tersebut Kadilmil menerapkan kebijakan dengan membuat jadwal piket hari Senin sampai dengan Jum'at bagi Staf dan PPNN secara bergiliran. Para Staf dan PPNN yang bertugas di PTSP tersebut dilaksanakan pelatihan oleh pengawas dan penanggung jawab PTSP.

Dengan pelatihan dan sosialisasi pelayanan PTSP tersebut para Staf dan PPNN memiliki keterampilan dalam memberikan pelayanan dan menguasai

produk-produk layanan Pengadilan, dengan terselenggaranya pelayanan yang baik tersebut diharapkan index responden yang puas terhadap layanan Pengadilan semakin meningkat dan dapat mempertahankan nilai index yang “sangat baik” tersebut.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 antara lain :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil survey Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi setiap Triwulan..
2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2024 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
3. Penandatanganan Perjanjian Kerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
4. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
5. Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap seluruh bagian.
6. Pengawasan setiap Triwulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Kep Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
7. Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

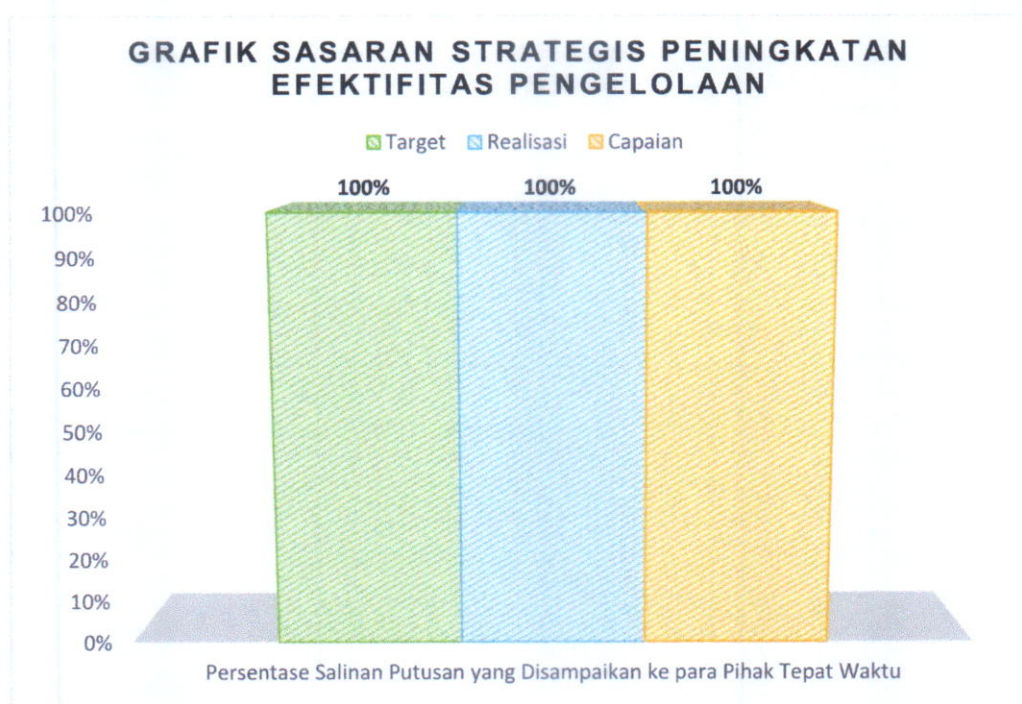
SASARAN 2

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA.

Pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, diukur dengan menetapkan 1 (satu)

indikator kinerja yaitu Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu, pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%



1. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2024 telah memenuhi target 100%. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa berkas perkara yang putus sejumlah 52 (lima puluh dua) perkara telah dikirimkan salinan putusan ke para pihak tepat waktu. Sebagaimana tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Berikut tabel capaian indikator kinerja pada persentase salinan putusan yang disampaikan kepada Papera, Oditur Militer, Polisi Militer, Ankum dan kepada Terdakwa tepat waktu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

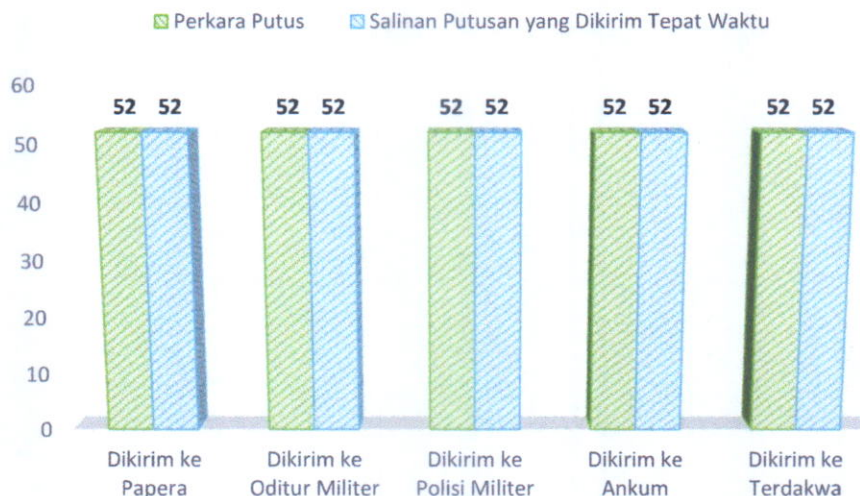
Bulan	Putus	Salinan Putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu	Keterangan
1	2	3	4
Januari	4	4	-
Februari	5	5	-
Maret	4	4	-
April	1	1	-
Mei	4	4	-
Juni	9	9	-
Juli	2	2	-
Agustus	11	11	-
September	5	5	-
Oktober	0	0	-
Nopember	6	6	-
Desember	1	1	-
Jumlah	52	52	

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun capaian indikator kinerja tersebut dapat di lihat pada grafik sebagai berikut:

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN
KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU
TAHUN 2024**



b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2024 berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang di kirim para pihak tepat waktu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yakni sebesar 100% (seratus persen).

Adapun perbandingannya dapat di lihat pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap

Tabel Pencapaian Target Kinerja

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE SALINAN
PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK
TEPAT WAKTU TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN
TAHUN 2024**



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2024 pada indikator kinerja **persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu** dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2020	2021	2022	2023	2025		
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100%	Realisasi 5 tahun = $(100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/5 = 100\%$

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2024 tercapai sesuai target jangka menengah yang telah ditetapkan. Atas dasar capaian tersebut diharapkan persentase target jangka menengah sebesar 100% akan tetap bisa tercapai pada tahun yang akan datang.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pada point 2 (dua) dinyatakan bahwa “untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP”. Dengan demikian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2024 sebesar 20% sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target maksimal yakni sebesar 100%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95%	100%	100%	100%	Target Satker tercapai

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak

e. Analisis Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tidak terlepas dari perwujudan dan

penyelesaian perkara tepat waktu dan publikasi perkara (*one day publish*) sehingga setelah Majelis Hakim membacakan putusannya diikuti dengan kesiapan produk putusan tersebut berupa petikan putusan dan salinan putusan untuk disampaikan kepada para pihak yaitu Papera (Perwira penyerah perkara), Oditur Militer, Polisi Militer, Ankum (Atasan yang berhak menghukum) dan Terdakwa sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah secara maksimal menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana di dalam persidangan tingkat pertama. Ketika putusan akhir selesai dibacakan, bagian Kepaniteraan dapat langsung memproses administrasi penyelesaian perkara sesuai SOP yang ada sehingga penyampaian salinan putusan kepada para pihak dapat terlaksana tepat waktu.

Pencapaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan capaian 100% (seratus persen) pada tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan Aparatur Teknis dan Non Teknis pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan konsisten dalam pelaksanaan indikator kinerja tersebut berpedoman pada SEMA Nomor 01 Tahun 2011.

Selain itu disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja **persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu** tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Komposisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bagian teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 hanya terdiri dari 5 (lima) orang Hakim Militer termasuk Kepala, 1 (satu) orang Panitera, dan 3 (tiga) orang Penitera Pengganti, sedangkan jabatan Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum masih kosong.

Namun demikian Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Panitera yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian tugas secara proporsional, Kadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja. Dengan komposisi tenaga teknis tersebut pada tahun 2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan dan memutus semua perkara yang ditangani sebanyak 52 (lima puluh dua).

Capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tersebut tidak terlepas pula dukungan kinerja para staf baik pada bagian Kepaniteraan maupun pada bagian Kesekretariatan. Semua staf melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan beban kerja yang ada dan dilaksanakan sesuai SOP dan aturan yang ada. Sehingga semua beban kerja dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tidak menjadi halangan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian perkara dan tugas-tugas administrasi lainnya. Semua beban kerja dapat dibagi habis kepada Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang tersedia.

Selain dukungan kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di unit kerja, capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu juga di dukung oleh ketersediaan pagu anggaran pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI khusus untuk pengiriman petikan dan salinan putusan kepada para pihak. Dengan dukungan anggaran tersebut pemenuhan target kinerja pada indikator persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu akan terealisasi sesuai target tahunan yang telah ditetapkan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2024 telah melaksanakan Beberapa program kerja yang secara tidak langsung mendukung capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2024 antara lain:

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Rapat bulanan sebagai media pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap seluruh bagian.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan per triwulan.
6. Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

SASARAN 3

MENINGKATKAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN.

Terwujudnya sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di ukur dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung

Pengadilan dengan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor Pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah, Instansi lain dan Pengadilan setempat.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	90%	100%	111%

1. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Capaian indikator kinerja pada indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada unit kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diwujudkan dengan pelaksanaan sidang keliling yang merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara yang lokasi kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para Saksi di nilai terlalu jauh sehingga menyulitkan Terdakwa atau Saksi untuk menghadiri persidangan.

Pada tahun 2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan 2 (dua) kali Pelaksanaan Sidang Keliling yang pertama dilaksanakan di Kota Samarinda bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 14 Juni 2024, jumlah berkas perkara yang

dirensidkan sebanyak 6 (enam) berkas perkara. Sidang Keliling yang kedua dilaksanakan pada tanggal 11 November sampai dengan tanggal 13 November 2024 jumlah berkas perkara yang dirensidkan sebanyak 4 (empat) berkas perkara yang bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dari kedua Pelaksanaan Sidang Keliling tersebut jumlah berkas perkara yang dirensidkan sebanyak 10 (sepuluh) berkas perkara.

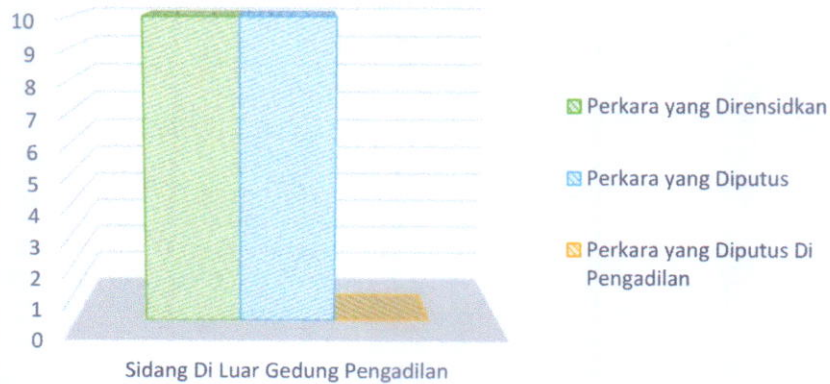
KEADAAN PERKARA SIDANG KELILING TAHUN 2024

Sidang Keliling	Tanggal Pelaksanaan	Rensid Perkara Sidang Keliling	Perkara putus	Lokasi Sidang Keliling
Ke-1	10 Juni s.d 14 Juni 2024	7	7	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Ke-2	11 November s.d 13 November 2024	3	3	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Total		10	10	

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) pada tahun 2024 telah memenuhi target kinerja sebesar 100% (seratus persen). Perkara yang di putus pada pelaksanaan sidang keliling tersebut sebanyak 10 (sepuluh) perkara dari semua perkara yang dirensidkan untuk disidangkan sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Rensid Perkara Sidang Keliling	Perkara Sidang Keliling Yang Diputus	Perkara Putus di Gedung Pengadilan	Ket.
1	2	3	4
10 (perkara)	10 (perkara)	-	-

**GRAFIK PERKARA YANG
DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG
PENGADILAN (SIDANG KELILING)
TAHUN 2024**



b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan** (sidang keliling) tahun 2024 mencapai persentase realisasi 100% (seratus persen), capaian tersebut berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (sidang keliling) dengan beberapa tahun sebelumnya dengan capaian persentase sebesar 100% (seratus persen).

Adapun perbandingannya dapat di lihat pada tabel dan grafik berikut:

Tahun	Rensid Perkara Sidang Keliling	Perkara Putus (Sidang Keliling)	Perkara Putus di Gedung Pengadilan	Ket.
1	2	3	4	5
2020	5 Perkara	5 Perkara	-	
2021	3 Perkara	3 Perkara	-	
2022	4 Perkara	4 Perkara	-	
2023	8 Perkara	8 Perkara	-	
2024	10 Perkara	10 Perkara	-	

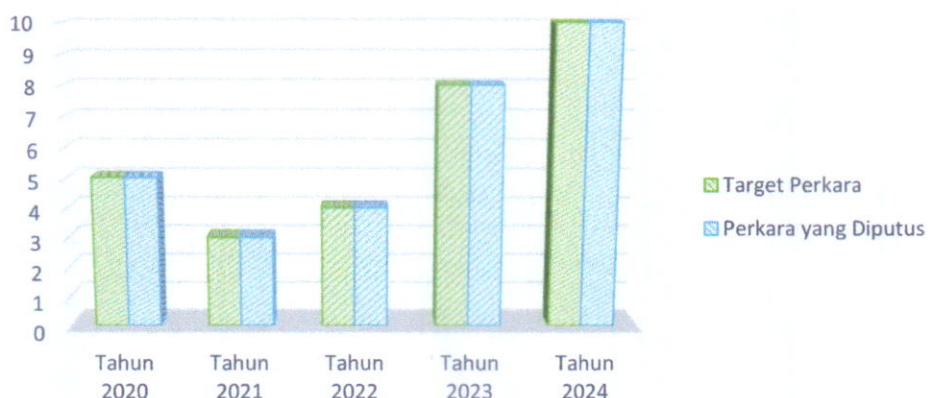
Tabel Perbandingan Perkara Sidang Keliling Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian target kinerja secara persentase pada tahun 2024 berbanding sama dengan capaian tahun 2020, 2021, dan 2022 dengan capaian persentase kinerjanya 100% (seratus persen) dan mengalami kenaikan persentase kinerjanya 111% (seratus sbeelas persen) pada tahun 2023 dan 2024. Pencapaian persentase tersebut dapat di lihat dari perbandingan antara jumlah perkara yang dirensidkan dengan jumlah perkara yang di putus pada pelaksanaan sidang keliling. Berikut tabel perbandingan capaian indikator kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) pada tahun 2020 sampai tahun 2024.

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja (Realisasi)					Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	111%	111%	Sama dengan tahun 2023, Kenaikan 11% dibandingkan dari tahun 2022, 2021 dan 2020

Tabel Pencapaian Target Kinerja Sidang Keliling

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024



	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah Perkara Yang Ditargetkan	5	3	4	8	10
Jumlah Perkara Putus Disidang Keliling	5	3	4	8	10

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (Sidang Keliling) sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis telah memenuhi target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	100 %	100 %	100 %	111 %	111 %	90%	Realisasi 5 tahun = (100%+100%+100%+111%+111) /5 = 104.4%

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan tahun 2024 telah tercapai sesuai target tahunan yang telah ditetapkan, bahkan capaian persentase kinerja pada tahun 2024 telah mencapai persentase target jangka menengah yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90% (sembilan puluh persen).

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dilaksanakan sesuai Standar Nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Capaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) pada Pengadilan

Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 apabila dibandingkan secara Nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI adalah sama bahwa Mahkamah Agung RI menetapkan target pada tahun 2024 sebesar 100% sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target maksimal sebesar 90%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	90%	100%	1111%	Target tercapai

e. Analisis Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pada tahun 2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan 2 (dua) kali Pelaksanaan Sidang Keliling yang pertama dilaksanakan di Kota Samarinda bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 14 Juni 2024, jumlah berkas perkara yang dirensidkan sebanyak 6 (enam) berkas perkara. Sidang Keliling yang kedua dilaksanakan pada tanggal 11 November sampai dengan tanggal 13 November 2024 jumlah berkas perkara yang dirensidkan sebanyak 4 (empat) berkas perkara yang bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dari kedua Pelaksanaan Sidang Keliling tersebut jumlah berkas perkara yang dirensidkan sebanyak 10 (sepuluh) berkas perkara. Pencapaian target kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) tersebut terealisasi karena tersedianya anggaran pelaksanaan sidang keliling pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI.

Pagu anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling (pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan Militer) pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 53.850.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh

ribu rupiah). Dengan tersedianya pagu anggaran pada DIPA (05) tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melakukan strategi percepatan penyelesaian perkara dengan membuat rencana sidang dan menyidangkan perkara melalui pelaksanaan sidang keliling.

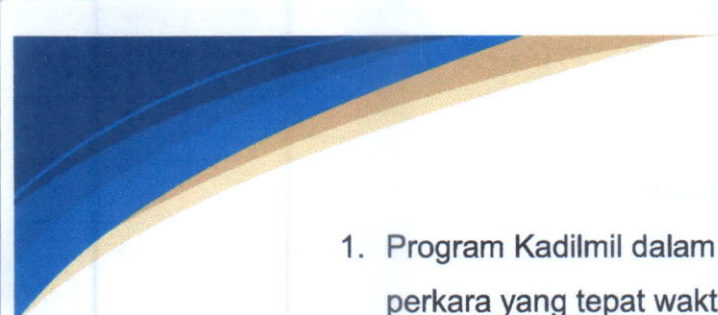
Target jumlah perkara yang akan diselesaikan melalui sidang keliling pada DIPA (05) tahun 2024 ditetapkan berjumlah 10 (sepuluh) perkara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merensidkan sebanyak 10 (sepuluh) perkara dan 10 (sepuluh) perkara tersebut semuanya disidangkan dan di putus melalui pelaksanaan sidang keliling tersebut.

Dengan demikian jumlah perkara yang di putus melalui mekanisme sidang keliling telah memenuhi jumlah target perkara sidang keliling pada DIPA (05) tahun 2024. Dengan demikian pagu yang tersedia pada DIPA (05) tersebut tercapai efektifitas karena jumlah penyelesaian perkara memenuhi target penyelesaian perkara yang tercantum pada DIPA (05) Ditjen Badilmitun Mahkamah Agung RI.

Dengan capaian kinerja tersebut Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan dan merealisasikan program kerja anggaran yang telah direncanakan pada DIPA (05) Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun demikian unit kerja telah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) bahwa dengan pagu anggaran yang tersedia pada DIPA (05) tahun 2024 sebesar Rp. 53.850.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat melaksanakan sidang keliling sebanyak 2 (dua) kali saja dalam setahun, realisasi kinerja tersebut berbanding sama dengan pelaksanaan sidang keliling pada beberapa tahun sebelumnya yang hanya bisa dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun berjalan.

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain :

- 
1. Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi percepatan penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2024.
 2. Membagi beban penyelesaian perkara yang ditangani kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secara proporsional.
 3. Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, seperti salah satunya dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
 4. Melaksanakan sidang keliling sesuai Rencana Sidang yang telah dibuat.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Komposisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bagian teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 hanya terdiri dari 5 (lima) orang Hakim Militer termasuk Kepala, 1 (satu) orang Panitera, dan 3 (tiga) orang Penitera Pengganti, sedangkan jabatan Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum masih kosong.

Namun demikian pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparaturnya atau anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2024 telah melaksanakan beberapa program kerja yang secara tidak langsung mendukung capaian kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) tahun 2024 antara lain:

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan per triwulan.
5. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
6. Mengikuti seluruh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
7. Penyerapan realisasi anggaran pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI kode satker 663247 Tahun 2024.

SASARAN 4

TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN YANG TERTIB ADMINISTRASI DAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.

Terwujudnya pelayanan Kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku diukur dengan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini, pada tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	96%	99,50%	102,58%
2.	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98%	98%	100%
3.	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98%	98%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penyelesaian Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

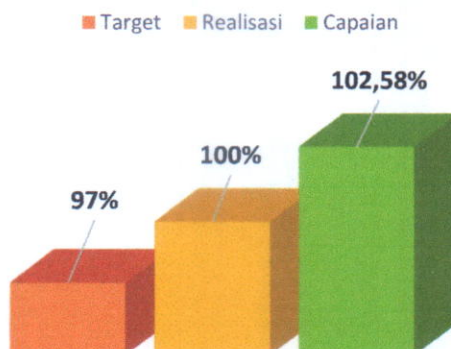
Persentase penyelesaian urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan adalah perbandingan antara laporan rencana program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang diselesaikan, dengan program dan anggaran teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang harus diselesaikan. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menyelesaikan laporan rencana program dan anggaran teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan selama tahun 2024 yang telah diselesaikan terdiri dari Laporan Reviu IKU, Reviu Renstra, RKT, PKT, Rencana Aksi dan LKjIP tahun 2023 serta telah menyusun laporan triwulanan program dan anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 yang ada di aplikasi E-Monev Bappenas, dan juga telah menyelesaikan kegiatan pada teknologi Informasi dan statisti, serta pemantauan evaluasi dan dokumentasi.

Berikut ini adalah tabel dan grafik pencapaian target kinerjanya tahun 2024 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	97%	99,50%	102,58%

Tabel Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

GRAFIK PRESENTASE PENYELESAIAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN STATISTIK SERTA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN TAHUN 2024



Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	97%	99,50%	102,58%

Berdasarkan data dan penjelasan tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja **Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan** pada tahun 2024 telah tercapai dengan persentase capaian 102,58% (Seratus dua koma lima puluh delapan persen). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Presentase

penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan pada tahun 2024 telah terpenuhi dengan target 97% (Sembilan puluh tujuh persen).

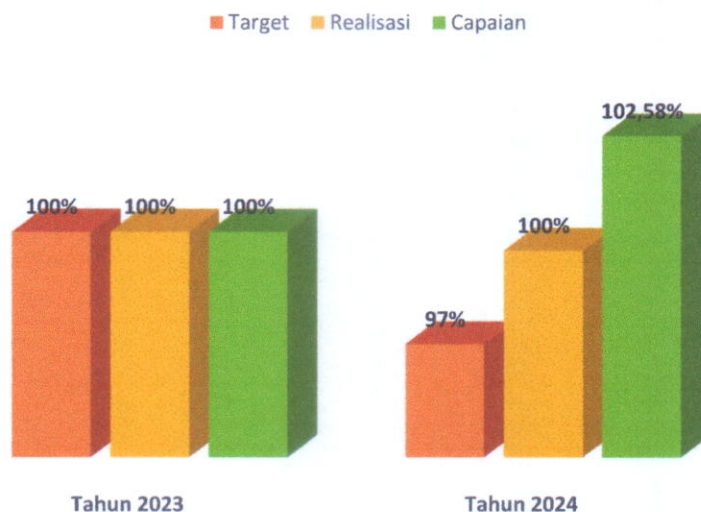
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2024, dengan tahun 2023.

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan tahun 2024, dapat dilihat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian mengalami Kenaikan sebesar 2,58% jika diperbandingkan dengan tahun 2023, berikut ini adalah perbandingan pencapaian target kinerja sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

TABEL PERBANDINGAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN STATISTIK SERTA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN TAHUN 2024

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2023			Tahun 2024			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	100%	100%	100%	97%	99,50%	102,58%	Kenaikan 2,58% dari tahun 2023,

**GRAFIK PRESENTASE PENYELESAIAN
PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN
PROGRAM DAN ANGGARAN, TEKNOLOGI
INFORMASI DAN STATISTIK SERTA PEMANTAUAN,
EVALUASI
DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN TAHUN
2024**



	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	100%	100%	100%	97%	99,50%	102,58%

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan pada tahun 2024 sudah mencapai Target jangka menengah dengan capaian realisasi 99,75%. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja			Keterangan
	Realisasi		Target Jangka Menengah	
	2023	2024		
Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	100%	99,50%	97%	Realisasi 2 tahun = $(100\%+99,50\%) / 2 = 99,75\%$

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan realisasi kinerja tahun 2024 untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan juga mengacu kepada standar target kinerja dan sasaran strategis yang hendak diwujudkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2020-2024.

Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2024 dengan target kinerja pada sasaran rencana strategis Mahkamah Agung 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Pengukuran Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Ket.
			2024	2024	2024	2024	
1.	Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	95%	100%	105,3%	Target tercapai
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	50%	75%	92,31%	124%	Target tercapai
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	85%	86,54%	101,81%	Target tercapai

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Ket.
			2024	2024	2024	2024	
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%	95%	98%	103,16%	Target tercapai
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	20%	100%	100%	100%	Target tercapai
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	90%	100%	111%	Target tercapai

Berdasarkan data pada tabel diatas hasil realisasi kinerja tahun 2024 Target kinerja pada indikator kinerja Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 apabila dibandingkan secara Nasional dengan target-target kinerja pada dokumen Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung telah tercapai.

e. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja.

Target kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang direncanakan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Indikator Kinerja sasaran 4 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	97%	99,50%	102,58%

2.	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98%	98%	100%
3.	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98%	98%	100%

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menyelesaikan laporan rencana program dan anggaran teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan selama tahun 2024 yang telah diselesaikan terdiri Laporan Reviu IKU, Reviu Renstra, RKT, PKT, Rencana Aksi dan LKjIP tahun 2023 serta telah menyusun laporan triwulanan program dan anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 yang ada di aplikasi E-Monev Bappenas. Laporan E-Monev Bappenas dan E-SAKIP, dan juga telah menyelesaikan kegiatan pada teknologi Informasi dan statistik, serta pemantauan evaluasi dan dokumentasi tepat waktu. Dengan demikian indikator kinerja **Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan** telah mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian 102,58%.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Kedudukan dan peran Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sangat penting, dimana Aparatur Peradilan sebagai sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Goverment*. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Aparatur Peradilan Militer) yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang peradilan, sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien yang merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen Sumber Daya Manusia yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi. Dibidang Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer I-

07 Balikpapan, selaku instansi pengemban kekuasaan kehakiman di tingkat Pertama dalam sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (*excellence service*) demi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, maka sudah barang tentu kenyataan tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan profesionalisme kinerja aparatur peradilan Militer serta menjadi pengakselerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

Secara umum Sumber Daya Manusia Aparatur Peradilan Militer yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pembinaan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Per 31 Desember 2024 sebanyak 26 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2024

No	Satker	Type	Jumlah Personel			Ket.
			L	P	Jumlah	
1.	Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	A	20	6	26	

Salah satu kondisi yang dapat mendukung tercapainya manajemen SDM yang efektif dan efisien antara lain adanya komposisi pegawai yang profesional baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan komposisi SDM yang seimbang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa beban kerja yang ada, maka penyelesaian tugas pokok dan fungsi serta visi, misi dan tujuan lembaga bisa diarahkan dan dicapai dengan maksimal, demikian sebaliknya apabila komposisi tenaga SDM yang tidak seimbang akan menjadi preseden buruk dalam pencapaian visi dan misi lembaga.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berikut kami laporkan komposisi Sumber Daya Manusia Peradilan Militer di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dari beberapa aspek, sehingga dapat tergambar kondisi Sumber Daya Manusia yang ada apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum.

Tenaga Teknis Yustisial adalah Sumber Daya Manusia pada Peradilan yang memiliki peranan yang sangat strategis yang bertugas melaksanakan semua

tugas teknis yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara, antara lain Kepala, Wakil Kepala, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti.

Pada tahun 2024 Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berjumlah 26 orang, terdiri dari tenaga teknis (Hakim dan Pejabat Kepaniteraan) berjumlah 11 orang, non teknis (Pejabat Struktural dan Administrasi) berjumlah 7 orang dan PPNPN berjumlah 8 orang.

I. Teknis

No	Kelompok Jabatan	Jabatan	Jumlah (Personel)	Ket.
1.	Teknis	Kepala	1	TNI
		Wakil Kepala	-	-
		Pokkimmil	4	TNI
		Panitera	1	TNI
		Panmud Pidana	-	-
		Pengadmin Hukum (Staf)	-	-
		Pengadmin Reg Perkara (Staf)	-	-
		Pengelola Perkara (Staf)	2	TNI/ASN
		Analisis Perkara Peradilan (Staf)	-	-
		Panmud Hukum	-	-
		Pengadmin Hukum (Staf)	-	-
		Pengadmin Reg Perkara (Staf)	-	-
		Pengelola Data Informasi dan Hukum (Staf)	-	-
		Panitera Pengganti	3	TNI

II. Non Teknis

No	Kelompok Jabatan	Jabatan	Jumlah (Personel)	Ket.
2.	Non Teknis	Sekretaris	1	TNI
		Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	ASN
		Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Staf)	-	-
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Staf)	-	-
		Pengolah Data dan Informasi (Staf)	1	ASN (BP Ke Dilmil II-09 Bandung)
		Kasubbag Umum dan Keuangan	-	-
		Penyusun Laporan Keuangan (Staf)	-	-
		Bendahara (Staf)	1	ASN
		Pengelola daftar gaji	-	-

	Pengadministrasian Keuangan	1	ASN (Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan)
	Pengelola Barang Milik Negara (Staf)	-	-
	Pranata Barang dan Jasa (Staf)	-	-
	Pranata Kearsipan (Staf)	-	-
	Pengadmin Persuratan (Staf)	-	-
	Pengadmin Pustakawan (Staf)	-	-
	Teknisi Sarana dan Prasarana (Staf)	-	-
	Ajudan (Staf)	-	-
	Pengemudi (Staf)	-	-
	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	ASN
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (Staf)	-	-
	Analisis Kepegawaian	1	ASN
	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Staf)	-	-
	Pengelola Kepegawaian (Staf)	-	-

Tabel Sebaran SDM Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Berdasarkan *Job Description* masing-masing jabatan, apabila dibandingkan dengan jumlah dan jenis pekerjaan serta intensitas volume pekerjaan dengan SDM Pengadilan Militer I-07 Balikpapan masih banyak kekurangan terutama di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sehingga dalam menyelesaikan tugas administrasi dibantu oleh tenaga kontrak yang seharusnya diperbantukan untuk pramubakti.

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2013 tentang kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil, bahwa seyogyanya setiap satuan kerja harus memiliki perhitungan angka kredit.

Hal ini sejalan dengan ketentuan KMA Nomor 143/KMA/SK/III/2007 tentang memberlakukan buku I, di dalam KMA tersebut secara rinci dan jelas ditentukan bagi setiap pengadilan, kebutuhan Hakim, Panitera di setiap kelas pengadilan. Maka setelah dilakukan Analisa beban kerja berdasarkan uraian jabatan dan tugas yang ada di Pengadilan maka dapat disimpulkan kebutuhan

sumber daya manusia baik fungsional tertentu (Hakim dan pejabat Kepaniteraan) maupun fungsional umum (staf/administrasi), sebagai berikut:

1. Sub. Bagian PTIP pada Tingkat Pertama dibutuhkan staf sebanyak 6 (lima) orang.
2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Ortala membutuhkan staf sebanyak 5 (enam) orang.
3. Sub. Bagian Umum dan Keuangan sebanyak 10 (sepuluh) orang.
4. Dan pada bagian Kepaniteraan diperlukan fungsional umum sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Jika dilihat dari data yang ada, baik tenaga teknis maupun non teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, sangatlah jauh dari ketentuan yang ada, sehingga kiranya dalam pengadaan **Calon Pegawai Negeri Sipil (ASN)** Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat di prioritaskan dalam mendapatkan Personel dikarenakan sangat sedikitnya personel yang ada di pengadilan Militer I-07 Balikpapan, hal ini sangatlah perlu menjadi perhatian agar tidak terjadinya pelayanan yang kurang maksimal kepada pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya, untuk mengatasi hal tersebut, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah memperdayakan tenaga kontrak yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan oleh PNS dan TNI dikerjakan oleh tenaga kontrak.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Pada tahun 2024 program Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang berhubungan dengan pencapaian kinerja, yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

- b) Terelesaiannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Program ini mencakup bagian kepaniteraan dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, yang dijabarkan menjadi beberapa rincian output sebagai berikut:

- a) Adanya perkara pidana yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- b) Adanya pelaksanaan sidang keliling ke wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

- a) Terwujudnya SDM peradilan yang berkompeten dibidang hukum dan peradilan.
- b) Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi SDM.
- c) Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan.
- d) Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Program Dukungan Manajemen mencakup bagian kesekretariatan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Kegiatan ini dijabarkan menjadi beberapa rincian output sebagai berikut:

Layanan Perkantoran.

Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretariat Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertanggungjawab terhadap pemenuhan seluruh kebutuhan operasional perkantoran baik kebutuhan dasar dan kebutuhan penunjang lainnya antara lain:

- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan;
- 2) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
- 3) Operasional kantor lainnya;
- 4) Pemeliharaan kendaraan;
- 5) Pencetakan dan penggandaan;
- 6) Sewa mesin fotokopi;
- 7) Pemeliharaan sarana kantor;
- 8) Pemeliharaan kendaraan dinas.

b) Pengadaan Sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Layanan Dukungan Manajemen.

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana merupakan penunjang sebuah organisasi dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas kedinasan. Tersedianya sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi sarana dan prasarana satuan kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan belum seluruhnya memenuhi kebutuhan. Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana setiap tahunnya semakin bertambah. Penambahan sarana dan prasarana

sangat menunjang dalam keberhasilan untuk pencapaian kinerja Sumber Daya Manusia.

2. Presentase Penyelesaian Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana.

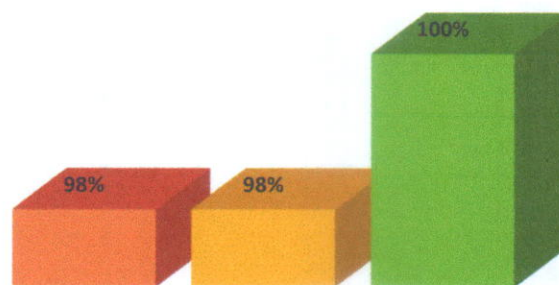
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana layanan kepegawaian adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi Sumber Daya Manusia. dapat digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98%	98%	100%

GRAFIK PRESENTASE PENYELESAIAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN, PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA TAHUN 2024

Target Realisasi Capaian



Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98%	98%	100%

Komposisi Personel Militer, ASN dan Tenaga PPNP pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut:

No	Foto	Nama	Pangkat/Korps/Gol NRP/NIP	Jabatan	Ket
Personel Militer					
1.		Desman Wijaya, S.H.,M.H.	Kolonel Laut (H) NRP 13134/P	Kadilmil I-07 Balikpapan	
2.		Suradi Sungkawatmojo, S. .H.	Letkol Chk NRP 2910013780370	Angg Pokkimmil Gol.V Dilmil I- 07 Balikpapan	Pindah Tugas ke Dilmil II-09 Bandung
3.		Dendi Sutiyoso, S.S., S.H	Letkol Chk NRP 21940113631072	Angg Pokkimmil Gol.VI Dilmil I- 07 Balikpapan	
4.		Alvie Syahri, S.H., M.H.	Mayor Chk NRP 11070050331282	Angg Pokkimmil Gol.VI Dilmil I- 07 Balikpapan	
5.		Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.H.I	Mayor Chk NRP 11090016420685	Angg Pokkimmil Gol.VI Dilmil I- 07 Balikpapan	
6.		Jasman, S.H., M.H.	Mayor Chk NRP 11110038420787	Angg Pokkimmil Gol.VII Dilmil I-07 Balikpapan	
7.		Hery Pujiyanto, S.H.	Mayor Chk NRP 29200875420571	Sekretaris Dilmil I- 07 Balikpapan	
8.		Tamrin, S.H., M.H.	Mayor Chk NRP 21960347280475	Panitera Dilmil I-07 Balikpapan	Pindah Tugas ke Dilmil III-16 Makassar
9.		Mahpul Saepuloh, S.H.	Mayor Chk NRP 21940135670972	Panitera Dilmil I-07 Balikpapan	
10.		Herman, S.H.	Letnan Satu Chk 21060076730384	Panitera Pengganti Dilmil I-07 Balikpapan	
11.		Suharto, S.H.	Peltu NRP 21950303131074	Panitera Pengganti Dilmil I-07 Balikpapan	

12.		Arief Lesmono, S.H.	Peltu NRP 21970058261076	Panitera Pengganti Dilmil I-07 Balikpapan	
13.		Fikriansyah, S.H.	Serma NRP 21060076990784	Pengelola Perkara Dilmil I-07 Balikpapan	
Personel Pegawai ASN					
1.		Sugeng Nuraini	Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP 197306201998031003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
2.		Sri Handajani	Penata Tingkat I (III/d) NIP 196712261991032002	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	
3.		-	-	Kasubbag Umum dan Keuangan	-
4.		Ryan Fernando, S.Sos	Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP 199201252019031006	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	
5.		Sarengat	Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP 19691023199103100	Pengadministrasian Keuangan pada Sub Bagian Umum dan Keuangan	Plt. Kasubba g Umum dan Keuangan
6.		Andi Satriawan, A.Md.A.B	Pengatur TK I (II/d) NIP 199506252020121007	Bendahara	
7.		Bella Shafira, A.Md.A.B	Pengatur (II/c) NIP 199807022022032015	Pengelola Sistem dan Jaringan	BP ke Dilmil II-09 Bandung
8.		Indri Niswanti, A.Md.A.B	Pengatur (II/c) NIP 199909202022032004	Pengelola Perkara	
Personel Tenaga Kontrak					
1.		Rendy Pratama Putra S.Kom	-	Security	
2.		Aloysia Maria Wahyu WD, S.Kom	-	Pramu Bhakti	

3.		Muhammad Subky, S.H.	-	Driver	
4.		Muh. Jauhari	-	Driver	
5.		Setiawan Ardy	-	Security	
6.		Rio Wiradani, S.E.I.	-	Pramu Bhakti	
7.		Siti Aisah	-	Pramu Bhakti	
8.		Selvina Zalfa R.	-	Pramu Bhakti	

Sumber Data: Subbagian Kepegawaian dan Ortala Dilmil I-07 Balikpapan Tahun 2024

Penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana selama tahun 2024 yang telah diselesaikan antara lain:

- **Mutasi**

Pada tahun 2024 terjadi beberapa kali, baik Personel yang masuk maupun Personel yang keluar dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dari data mutasi yang ada dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama	Pkt/Korps/NRP/NIP	No.Kep/Sprin	Jabatan	
				Lama	Baru
1	2	3	4	5	6
Mutasi Masuk Tahun 2024 :					
1.	Andhika Dimas Dwipa, S.H.,M.H.I	Mayor Chk NRP 11090016420685	Surat Perintah Pengadilan Militer Utama Nomor : 77/KPMU/SP.HK3.1.1/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer	Klerek-Analis Perkara Dilmil III-12 Surabaya	Angg. Pokkimmil Gol. VI Dilmil I-07 Balikpapan

1	2	3	4	5	6
2.	Jasman, S.H.,M.H.	Mayor Chk NRP 11110038420787	Surat Perintah Pengadilan Militer Utama Nomor : 77/KPMU/SP.HK3.1.1/I/202 4 tanggal 31 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer	Klerek-Analis Perkara Dilmil III-12 Surabaya	Angg Pokkimmil Gol.VII Dilmil I-07 Balikpapan
3.	Mahpul Saepuloh, S.H.	Mayor Chk NRP 21940135670972	Surat Keputusan Ditjenbadimiltun MARI Nomor : 116/DJMT/SK.KP1.4.3/VIII/ 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer	Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar	Panitera Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
4.	Herman, S.H.	Letnan Satu Chk 21060076730384	Surat Keputusan Ditjenbadimiltun MA RI Nomor : 116/DJMT/ SK.KP4.1.3/VIII/2024 Tanggal 1 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Militer	Kudam XVI/PTM	Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Mutasi Keluar tahun 2024 :

1.	Suradi Sungkowatmojo,S.H.	Letkol Chk NRP 2910013780370	Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 1706/KPMT.WI- Mil/SP.KP4.1.3/X/2024 Tanggal 04 Oktober 2024 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian dan Pemindahan Dalam Jabatan di Lingkungan Peradilan Militer.	Angg. Pokkimmil Gol. V Dilmil I- 07 Balikpapan	Angg. Pokkimmil Gol. V Dilmil II-09 Bandung
2.	Tamrin,S.H.,M.H.	Mayor Chk NRP 21960347280475	Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 1875/KPMT.WI- Mil/SP.KP4.1.3/XI/2024 tanggal 05 November 2024 tentang Pelaksanaan Pemberhentian dan Pemindahan Dalam Jabatan di Lingkungan Peradilan Militer.	Panitera Dilmil I-07 Balikpapan	Panitera Dilmil III-16 Makassar

1	2	3	4	5	6
3.	Bella A.Md.A.B.	Shafira, Pengatur (II/c) NIP 199807022022032015	Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : 860/KPMU/SP.KP4.1.3/X II/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Perbantuan pada Dilmil II-09 Bandung.	Klerek- Pengelola data dan Informasi pada Dilmil I-07 Balikpapan	BP Dilmil II-09 Bandung

Sumber Data: Arsip Subbagian Kepegawaian dan Ortala Dilmil I-07 Balikpapan Tahun

• Promosi

Promosi merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong pegawai dan Anggota TNI untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi. Penempatan Personel TNI dan Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan tertentu membuka kesempatan baginya untuk naik pangkat menurut jenjang pangkat yang disediakan untuk jabatan tersebut. Data promosi Jabatan tahun 2024 pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

a) Promosi Jabatan

No	Nama	Pkt/Korps/NRP/ NIP	No. Kep/Surat	Jabatan	
				Lama	Baru
1.					
			NI HIL		

Sumber Data: Subbagian Kepegawaian dan Ortala Dilmil I-07 Balikpapan Tahun 2024

b) Promosi Naik Pangkat/Golongan

No	Nama	Pangkat/Korps/NRP/ NIP	No. Kep/Surat	Pangkat	
				Lama	Baru
1.	Jasman, S.H.,M.H.	Mayor Chk NRP 11110038420787	Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1140/IX/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Perwira TNI AD dari Kapten ke Mayor	Kapten Chk	Mayor Chk
2.	Andi Satriyawan, A.Md	Pengatur TK I (II/d) NIP19950625202012 1007	Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 1919/KPMT.W1- Mil/SK.KP2.1.1/XI/2024 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pengadilan Militer Tinggi I Medan	Pengatur (II/c)	Pengatur TK I (II/d)

Sumber Data: Subbagian Kepegawaian dan Ortala Dilmil I-07 Balikpapan Tahun 2024

c) Pensiun

Personel yang Pensiun pada tahun 2024 pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Satker	Nama/Pkt/Korps/ NRP/NIP	Nomor Skep
1.	Nihil	-	-

Sumber Data: Subbagian Kepegawaian dan Ortala Dilmil I-07 Balikpapan Tahun 2024

d) Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengikuti beberapa Diklat yang dilaksanakan dalam rangka Diklat pembinaan teknis Yudisial yaitu dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Dilmiltama, dan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI selama tahun 2024 seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Nama	Diklat	Penyelenggara	Tanggal
1	Desman Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13134/P Kepala	Pelatihan Singkat Penulisan Artikel Populer Hukum	PP IKAHI	27 Maret 2024
		Pemanggilan Profile Assesment	Ditjenbadimiltun MA RI	22 – 29 Mei 2024
		Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengaturan Eselonisasi Jabatan Struktural	Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI	4 Juli 2024
		Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial	Mahkamah Agung RI	18 Juli 2024
		Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Restorative Justice	Ditjenbadimiltun MA RI	12 s.d. 17 September 2024
		Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan, Panitera dan Sekretaris	Balitbangkumdil MA RI	19 September 2024
		Sosialisasi pembaharuan aplikasi SIPP TK Pertama versi 5.6.0 dan aplikasi e- Court versi 6.0	BUA MA RI	3 Oktober 2024
		Pelatihan singkat pembaharuan hukum	MA RI	13 s.d 22 Nov 2024

		pidana bagi hakim TK I dan Banding peradilan militer		
		Webinar Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia)	SEKMA RI	9 Desember 2024
		Sosialisasi juknis mengadili perkara pidana melalui restorative justice	Ditjenbadimiltun MA RI	12 Desember 2024
2	Suradi Sungkowatmojo, S.H Letnan Kolonel Chk 2910013780370 Pokkimmil Gol.V	Pelatihan Singkat Penulisan Artikel Populer Hukum	PP IKAHI	27 Maret 2024
		Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengaturan Eselonisasi Jabatan Struktural	Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI	4 Juli 2024
		Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial	Mahkamah Agung RI	18 Juli 2024
		Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Restorative Justice	Ditjenbadimiltun MA RI	15 s.d. 17 September 2024
		Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan, Panitera dan Sekretaris	Balitbangkumdil MA RI	19 September 2024
		Sosialisasi pembaharuan aplikasi SIPP TK Pertama versi 5.6.0 dan aplikasi e-Court versi 6.0	BUA MA RI	3 Oktober 2024
3	Dendi Sutiyoso S. Saputro S.H Letnan Kolonel Chk 21940113631072 Pokkimmil Gol.V	Pelatihan Singkat Penulisan Artikel Populer Hukum	PP IKAHI	27 Maret 2024
		Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik oleh Kepaniteraan MA RI	Mahkamah Agung RI	28 Mei 2024
		Bimtek Hakim Koneksitas	Ditjenbadimiltun MA RI	26 s.d 28 Juni 2024
		Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengaturan Eselonisasi Jabatan Struktural	Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI	4 Juli 2024
		Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial	Mahkamah Agung RI	18 Juli 2024
		Sosialisasi pembaharuan aplikasi SIPP TK Pertama versi 5.6.0 dan aplikasi e-Court versi 6.0	BUA MA RI	3 Oktober 2024
		Bimtek Kompetensi Hakim "pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan"	Ditjenbadimiltun MA RI	13 s.d 15 Nov 2024
		Pelatihan sertifikasi lingkungan hidup bagi hakim Peradilan	Pusdik Teknis MA RI	25 Nov s,d 15 Des 2024

		Umum, Dilmil dan TUN angkatan XX 2024		
		Webinar Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia)	SEKMA RI	9 Desember 2024
		Sosialisasi juknis mengadili perkara pidana melalui restorative justice	Ditjenbadimiltun MA RI	12 Desember 2024
4	Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk 11070050331282 Pokkimmil Gol.VI	Pelatihan Singkat Penulisan Artikel Populer Hukum	PP IKAHI	27 Maret 2024
		Susjabkimmil XXV	Pusdikbangpes Kodiklat TNI	23 April s.d 23 Juli 2024
		Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan, Panitera dan Sekretaris	Balitbangkumdil MA RI	19 September 2024
		Sosialisasi pembaharuan aplikasi SIPP TK Pertama versi 5.6.0 dan aplikasi e-Court versi 6.0	BUA MA RI	3 Oktober 2024
		Webinar Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia)	SEKMA RI	9 Desember 2024
		Sosialisasi juknis mengadili perkara pidana melalui restorative justice	Ditjenbadimiltun MA RI	12 Desember 2024
5	Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.H.I. Mayor Chk 11090016420685 Pokkimmil Gol.VI	Pelatihan Singkat Penulisan Artikel Populer Hukum	PP IKAHI	27 Maret 2024
		Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengaturan Eselonisasi Jabatan Struktural	Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI	4 Juli 2024
		Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan, Panitera dan Sekretaris	Balitbangkumdil MA RI	19 September 2024
		Sosialisasi pembaharuan aplikasi SIPP TK Pertama versi 5.6.0 dan aplikasi e-Court versi 6.0	BUA MA RI	3 Oktober 2024
		Webinar Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia)	SEKMA RI	9 Desember 2024
		Sosialisasi juknis mengadili perkara pidana melalui restorative justice	Ditjenbadimiltun MA RI	12 Desember 2024
6	Jasman, S.H., M.H. Mayor Chk 11110038420787 Pokkimmil Gol.VI	Pelatihan Singkat Penulisan Artikel Populer Hukum	PP IKAHI	27 Maret 2024
		Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Proposal	Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI	17 Mei 2024

		Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengaturan Eselonisasi Jabatan Struktural	Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI	4 Juli 2024
		Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan, Panitera dan Sekretaris	Balitbangkumdil MA RI	19 September 2024
		Sosialisasi pembaharuan aplikasi SIPP TK Pertama versi 5.6.0 dan aplikasi e-Court versi 6.0	BUA MA RI	3 Oktober 2024
		E-Learning peningkatan pemahaman gratifikasi	Pusat edukasi antikorupsi	7 November 2024
		Webinar Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia)	SEKMA RI	9 Desember 2024
		Sosialisasi juknis mengadili perkara pidana melalui restorative justice	Ditjenbadimiltun MA RI	12 Desember 2024
7	Hery Pujiatono, S.H Mayor Chk 2920087520571 Sekretaris	Sosialisasi Petunjuk Penyusunan RKA-K/L TA 2025 Mahkamah Agung RI	BUA MA RI	28 Juni 2024
		Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan dan Penganggaran Mahkamah Agung TA 2025	BUA MA RI	2 Juli 2024
		Sosialisasi Kehiatan Inventaris Tanah Instansi Pemerintahan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Petanahan Provinsi Kaltim	3 Juli 2024
		Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial	Mahkamah Agung RI	18 Juli 2024
		Sosialisasi Pemberlakuan Aplikasi eSurvei pada Seluruh Satuan Kerja Ditjen Badilmiltun	Ditjenbadilmiltun MA RI	25 Juli 2024
		Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan, Panitera dan Sekretaris	Balitbangkumdil MA RI	19 September 2024
8	Mahpul Saepuloh, S.H. Mayor Chk 21940135670972	Webinar Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia)	SEKMA RI	9 Desember 2024
		Sosialisasi juknis mengadili perkara pidana melalui restorative justice	Ditjenbadimiltun MA RI	12 Desember 2024
9	Tamrin, S.H., M.H. Mayor Chk 21960347280475 Panitera	Bimtek Panitera/PP Peradilan Militer TA 2024	Ditjenbadimiltun MA RI	20 – 22 Mei 2024
		Sosialisasi dan Monitoring	Mahkamah Agung RI	27 Mei 2024

		Penyelesaian Perkara Elektronik		
		Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik oleh Kepaniteraan MA RI	Mahkamah Agung RI	28 Mei 2024
		Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial	Mahkamah Agung RI	18 Juli 2024
		Sosialisasi Pemberlakuan Aplikasi eSurvei pada Seluruh Satuan Kerja Ditjen Badilmiltun	Ditjenbadilmiltun MA RI	25 Juli 2024
		Sosialisasi pembaharuan aplikasi SIPP TK Pertama versi 5.6.0 dan aplikasi e-Court versi 6.0	BUA MA RI	3 Oktober 2024
10	Suharto Pembantu Letnan Satu 21950303131074 Panitera Pengganti	Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik oleh Kepaniteraan MA RI	Mahkamah Agung RI	28 Mei 2024
		Sosialisasi Pemberlakuan Aplikasi eSurvei pada Seluruh Satuan Kerja Ditjen Badilmiltun	Ditjenbadilmiltun MA RI	25 Juli 2024
		Bimtek kepaniteraan dengan tema "penyelarasan dan harmonisasi perjanjian kerja sama aplikasi e-berpadu dalam rangka terwujudnya pengadilan yang tangguh"	Dilmiltama	9 s.d 11 September 2024
		Sosialisasi pembaharuan aplikasi SIPP versi 5.6.0 dan aplikasi e-Court versi 6.0	BUA MA RI	3 Oktober 2024
11	Arief Lesmono, S.H Pembantu Letnan Satu 21970058261076 Panitera Pengganti	Bimtek Panitera/PP Peradilan Militer TA 2024	Dilmiltama	5 s.d 7 Februari 2024
		Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik oleh Kepaniteraan MA RI	Mahkamah Agung RI	28 Mei 2024
		Sosialisasi Aplikasi E-Berpadu Dalam Rangka Mewujudkan Digitalisasi Administrasi Pidana serta Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum	Pengadilan Militer Utama	12 Juni s.d. 14 Juni 2024
		Sosialisasi Pemberlakuan Aplikasi eSurvei pada Seluruh Satuan Kerja Ditjen Badilmiltun	Ditjenbadilmiltun MA RI	25 Juli 2024

		Bimtek kepaniteraan dengan tema “penyelarasan dan harmonisasi perjanjian kerja sama aplikasi e-berpadu dalam rangka terwujudnya pengadilan yang tangguh	Dilmiltama	9 s.d 11 September 2024
		Sosialisasi pembaharuan aplikasi SIPP TK Pertama versi 5.6.0 dan aplikasi e-Court versi 6.0	BUA MA RI	3 Oktober 2024
12	Sri Handajani Penata TK I (IIId) 1967122619910320 Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sosialisasi Daring Teknis Penginputan Aplikasi E-Monev 2024	BUA MA RI	21 Maret 2024
		Pelaksanaan Bimtek Teknis JDIH Mahkamah Agung	Mahkamah Agung RI	21 Mei 2024
		Sosialisasi Petunjuk Penyusunan RKA-K/L TA 2025 Mahkamah Agung RI	BUA MA RI	28 Juni 2024
		Bimtek Penyusunan Baseline TA 2026 pada Aplikasi E-IPLANS	Mahkamah Agung	19 Desember 2024
13	Sugeng Nuraini Penata Muda Tk I (IIIb) 197306201998031003 Kasubbag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	Webinar Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia)	SEKMA RI	9 Desember 2024
14	Sarengat Penata Muda TK I (IIIb) 196910231991031005 Klerek - Pengadministrasi Perkantoran/Plt.Kasubbag Umum dan Keuangan	Kegiatan Tindak Lanjut Penyelesaian Penerbitan BMN Dalam Rangka Implementasi Siman v2 Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	27 Mei 2024 s.d 29 Mei 2024
		Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembukaan Blokir Automatic Adjustment	BUA Mahkamah Agung RI	15 Agustus 2024
		Bimtek Pendaftaran Akun INAPROC Non Penyedia	LKPP	19 Desember 2024
15	Ryan Fernando, S.Sos Penata Muda TK I(IIIb) 199201252019031006 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Sosialisasi menu angka kredit dan persetujuan PAK pada aplikasi e-kinerja	BUA MA RI	9 Januari 2024
		Manajemen Talenta ASN	Smart ID	20 Juni 2024
		Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja	BUA MA RI	25 Juli 2024

		Melalui Aplikasi Gaji Web		
16	Andi Satriyawan, A.Md Pengatur (Ilc) 199506252020121007 Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Sosialisasi peraturan dan strategi optimalisasi capaian IKPA	Ditjenbadimiltun MA RI	22 Januari 2024
		Sosialisasi penyusunan laporan keuangan tingkat satker (UAKPA) TA 2023	KPPN Balikpapan	29 Januari 2024
		Sosialisasi Anti Korupsi dan Anti Korupsi 2024	KPPN Balikpapan	29 Januari 2024
		Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan bulan Februari 2024	KPPN Balikpapan	7 Februari 2024
		Bimtek Roll Out Penyampaian LPJ Bendahara pengeluaran melalui Aplikasi SAKTI	Dirjen Perbendaharaan	29 Februari 2024
		Pelatihan penguatan pengendalian gratifikasi dan anti korupsi dalam pengelolaan BMN	KPPN	27 Maret 2024
		Monev Penginputan Sewa Rumah Dinas Pada E Bima	BUA MA RI	24 April 2024
		Sosialisasi PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga	KPPN Balikpapan	26 Juni 2024
		Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Melalui Aplikasi Gaji Web	BUA MA RI	25 Juli 2024
		Sosialisasi pembayaran tunjangan kinerja	Biro Keuangan MA RI	24 Oktober
		Rapat Koordinasi Pelaksanaan BPK atau PNPB	Mahkamah Agung RI	5 Agustus 2024
		Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembukaan Blokir Automatic Adjustment	BUA Mahkamah Agung RI	15 Agustus 2024
		Sosialisasi Per-13/PB/2024 ttg LLAT 2024 dan rekonsiliasi data laporan keuangan dalam digitalisasi keuangan negara	KPPN Balikpapan	02 Oktober 2024
17	Fikriansyah, S.H. Sersan Mayor 21060076990784 Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik oleh Kepaniteraan MA RI	Mahkamah Agung RI	28 Mei 2024
		Sosialisasi pembaharuan aplikasi	BUA MA RI	3 Oktober 2024

		SIPP TK Pertama versi 5.6.0 dan aplikasi e-Court versi 6.0		
18	Bella Shafira, A.Md.A.B. Pengatur (Iic) 199807022022032015 Klerek - Pengolah Data dan Informasi	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	LKPP	19 Feb s.d 11 April 2024
		Sosialisasi Daring Teknis Penginputan Aplikasi E-Monev 2024	BUA MA RI	21 Maret 2024
		Pelaksanaan Bimtek Teknis JDIIH Mahkamah Agung	Mahkamah Agung	21 Mei 2024
		Sosialisasi Petunjuk Penyusunan RKA-K/L TA 2025 Mahkamah Agung RI	BUA MA RI	28 Juni 2024
19	Indri Niswanti, A.Md.A.B. Pengatur (Iic) 199909202022032004 Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik	Mahkamah Agung RI	27 Mei 2024
		Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik oleh Kepaniteraan MA RI	Mahkamah Agung RI	28 Mei 2024
		Sosialisasi Aplikasi E-Berpadu Dalam Rangka Mewujudkan Digitalisasi Administrasi Pidana serta Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum	Pengadilan Militer Utama	12 Juni s.d. 14 Juni 2024
		Sosialisasi pembaharuan aplikasi SIPP TK Pertama versi 5.6.0 dan aplikasi e-Court versi 6.0	BUA MA RI	3 Oktober 2024
20	Rendy Pratama Putra, S.Kom PPNPN	E-Learning Bendahara Penerimaan Angkatan XI Tahun Anggaran 2024	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kemenkeu RI	11 s.d 15 Nov 2024
		Sosialisasi pengelolaan tunjangan kineja tahun 2024	BUA MA RI	2 Januari 2024
		Sosialisasi penyusunan laporan keuangan tingkat satker (UAKPA) TA 2023	KPPN Balikpapan	29 Januari 2024
		Sosialisasi Anti Korupsi dan Anti Korupsi 2024	KPPN Balikpapan	29 Januari 2024
		Kegiatan Tindak Lanjut Penyelesaian Penerbitan BMN Dalam Rangka Implementasi Siman v2 Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	27 Mei 2024 s.d 29 Mei 2024
		Bimtek Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA Dan Pengisian Capaian Output	KPPN	24 April 2024

	Sosialisasi Penertipan BMN dalam Rangka Implementasi SIMAN v2 secara Daring	BUA MA RI	15 Juni 2024
	Kegiatan Persiapan Penyusun Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA. 2026	BUA Mahkamah Agung RI	26 Juni 2024
	Kegiatan Seminar Solutions Day With Solutions Patner	CV. Multi Mandiri Prima	9 juli 2024
	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SIMAN V.2	Kanwil DJP Kaltim	15-17 Juli 2024
	Kegiatan Bimtek Pembayaran Tukin Melalui Aplikasi Gaji dan Sosialisasi Rekonsiliasi dalam Penyusun dan Penyampian Laporan Keuangan UAKPA Semester I tahun 2024	KPPN Balikpapan	26 Juli 2024
	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembukaan Blokir Automatic Adjustment	BUA Mahkamah Agung RI	15 Agustus 2024
	Sosialisasi Pengusulan Pengelolaan Barang Milik Negara SIMAN v2	BUA Mahkamah Agung RI	16 Agustus 2024
	Sosialisasi Fitur Standarisasi Aplikasi E Sadewa	BUA MA RI	26 Agustus 2024
	FGD Refreshment bendahara terkait pengelolaan kas dan rekening	KPPN Balikpapan	29 Agustus 2024
	Sosialisasi tindak lanjut terkait konfirmasi kendala migrasi pada aplikasi SIMAN versi 2	BUA MA RI	17 September 2024s
	Sosialisasi resosialisasi aplikasi e monev bappenas	BUA MA RI	19 September 2024
	Sosialisasi pembayaran gaji dan tunjangan jabatan hakim	BUA MA RI	01 November 2024
	Bimtek Pengelolaan BMN	PTA Samarinda	26 November 2024

21	Aloysia Maria Wahyu Widianingsih, S.Kom. PPNP	Blmtek optimalisasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Lingkungan Peradilan Militer	Ditjenbadimiltun MA RI	13 November 2024
		Bimtek Penyusunan Baseline TA 2026 pada Aplikasi E-IPLANS	Mahkamah Agung	19 Desember 2024
22	Muhammad Subky, S.H. PPNP	-	-	-
23	Muh.Jauhari PPNP	-	-	-
24	Setiawan Ardy PPNP	-	-	-
25	Rio Wiradani, S.E.I PPNP	-	-	-
26	Siti Aisah PPNP	-	-	-
27	Pahredi PPNP	-	-	-
28	Selvina Zalfa Rindiawan PPNP	-	-	-

Dengan Kegiatan tersebut diyakini mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap wawasan, ilmu serta kinerja dalam penyelesaian perkara dan menghasilkan produk putusan yang berkeadilan dan pelayanan yang berkualitas sehingga kepuasan para pencari keadilan terpenuhi.

Berdasarkan data dan penjelasan tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana pada tahun 2024 telah tercapai dengan persentase capaian 100% (Seratus persen). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana pada tahun 2024 telah terpenuhi dengan target 98% (Sembilan puluh delapan persen).

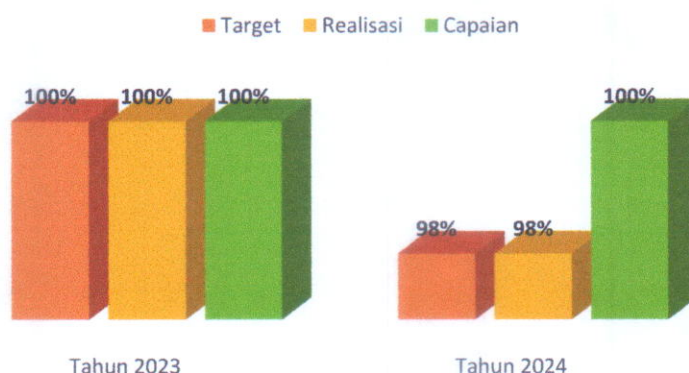
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2024, dengan tahun 2023.

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana tahun 2024, dapat dilihat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian indikator kinerja yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dan pada tahun 2024, berikut adalah

perbandingan pencapaian target kinerja sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Keterangan
	Tahun 2023			Tahun 2024			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	100%	100%	100%	98%	98%	100%	Persentase Pencapaian target terpenuhi

GRAFIK PRESENTASE PENYELESAIN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN, PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA TAHUN 2023 - 2024



	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100%	98%
Realisasi	100%	98%
Capaian	100%	100%

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana pada tahun 2024 sudah mencapai Target jangka menengah dengan capaian realisasi 99%. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja			Keterangan
	Realisasi		Target Jangka Menengah	
	2023	2024		
Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	100%	98%	98%	Realisasi 2 tahun = (100%+98%) /2 = 99%

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional.

Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2024 dengan target-target kinerja pada sasaran rencana strategis Mahkamah Agung 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Dengan Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Pengukuran Kinerja
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
			2024	2024	2024	2024	
1.	Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	95%	100%	105,3%	Target tercapai
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	50%	75%	92,31%	124%	Target tercapai
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	85%	86,54%	101,81%	Target tercapai
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%	95%	98%	103,16%	Target tercapai
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	20%	100%	100%	100%	Target tercapai
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	90%	100%	111%	Target tercapai

Berdasarkan data pada tabel diatas hasil realisasi kinerja tahun 2024 Target kinerja pada indikator kinerja Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 apabila dibandingkan secara Nasional dengan target-target kinerja pada dokumen Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung telah tercapai.

e. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja.

Target kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang direncanakan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Indikator Kinerja sasaran 4 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	97%	99,50%	102,58%
2.	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98%	98%	100%
3.	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98%	98%	100%

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menyelesaikan laporan penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana selama tahun 2024 yang telah diselesaikan terdiri dari Laporan Promosi Jabatan, Promosi Naik Pangkat/Golongan, Purna Tugas (Pensiun), Diklat (Sumber Daya Manusia Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).

Dengan demikian indikator kinerja Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana telah mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian 100%.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Kedudukan dan peran Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sangat penting, dimana Aparatur Peradilan sebagai sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Goverment*. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Aparatur Peradilan Militer) yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang peradilan, sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien yang merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen Sumber Daya Manusia yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi. Dibidang Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, selaku instansi pengemban kekuasaan kehakiman di tingkat Pertama dalam sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (*excellence service*) demi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, maka sudah barang tentu kenyataan tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan profesionalisme kinerja aparaturnya peradilan Militer serta menjadi pengakselerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

Secara umum Sumber Daya Manusia Aparatur Peradilan Militer yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pembinaan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Per 31 Desember 2024 sebanyak 26 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2024

No	Satker	Type	Jumlah Personel			Ket.
			L	P	Jumlah	
1.	Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	A	20	6	26	

Salah satu kondisi yang dapat mendukung tercapainya manajemen SDM yang efektif dan efisien antara lain adanya komposisi pegawai yang profesional baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan komposisi SDM yang seimbang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa beban kerja yang ada, maka

penyelesaian tugas pokok dan fungsi serta visi, misi dan tujuan lembaga bisa diarahkan dan dicapai dengan maksimal, demikian sebaliknya apabila komposisi tenaga SDM yang tidak seimbang akan menjadi preseden buruk dalam pencapaian visi dan misi lembaga.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berikut kami laporkan komposisi Sumber Daya Manusia Peradilan Militer di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dari beberapa aspek, sehingga dapat tergambar kondisi Sumber Daya Manusia yang ada apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum.

Tenaga Teknis Yustisial adalah Sumber Daya Manusia pada Peradilan yang memiliki peranan yang sangat strategis yang bertugas melaksanakan semua tugas teknis yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara, antara lain Kepala, Wakil Kepala, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti.

Pada tahun 2024 Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berjumlah 26 orang, terdiri dari tenaga teknis (Hakim dan Pejabat Kepaniteraan) berjumlah 11 orang, non teknis (Pejabat Struktural dan Administrasi) berjumlah 7 orang dan PPNPN berjumlah 8 orang.

I. Teknis

No	Kelompok Jabatan	Jabatan	Jumlah (Personel)	Ket.
1.	Teknis	Kepala	1	TNI
		Wakil Kepala	-	-
		Pokkimmil	4	TNI
		Panitera	1	TNI
		Panmud Pidana	-	-
		Pengadmin Hukum (Staf)	-	-
		Pengadmin Reg Perkara (Staf)	-	-
		Pengelola Perkara (Staf)	2	TNI/ASN
		Analisis Perkara Peradilan (Staf)	-	-
		Panmud Hukum	-	-
		Pengadmin Hukum (Staf)	-	-
		Pengadmin Reg Perkara (Staf)	-	-
		Pengelola Data Informasi dan Hukum (Staf)	-	-
		Panitera Pengganti	3	TNI

II. Non Teknis

No	Kelompok Jabatan	Jabatan	Jumlah (Personel)	Ket.
2.	Non Teknis	Sekretaris	1	TNI
		Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	ASN
		Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Staf)	-	-
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Staf)	-	-
		Pengolah Data dan Informasi (Staf)	1	ASN (BP Ke Dilmil II-09 Bandung)
		Kasubbag Umum dan Keuangan	-	-
		Penyusun Laporan Keuangan (Staf)	-	-
		Bendahara (Staf)	1	ASN
		Pengelola daftar gaji	-	-
		Pengadministrasian Keuangan	1	ASN (Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan)
		Pengelola Barang Milik Negara (Staf)	-	-
		Pranata Barang dan Jasa (Staf)	-	-
		Pranata Kearsipan (Staf)	-	-
		Pengadmin Persuratan (Staf)	-	-
		Pengadmin Pustakawan (Staf)	-	-
		Teknisi Sarana dan Prasarana (Staf)	-	-
		Ajudan (Staf)	-	-
		Pengemudi (Staf)	-	-
		Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	ASN
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (Staf)	-	-
		Analisis Kepegawaian	1	ASN
		Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Staf)	-	-
		Pengelola Kepegawaian (Staf)	-	-

Tabel Sebaran SDM Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Berdasarkan *Job Description* masing-masing jabatan, apabila dibandingkan dengan jumlah dan jenis pekerjaan serta intensitas volume pekerjaan dengan SDM Pengadilan Militer I-07 Balikpapan masih banyak kekurangan terutama di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sehingga dalam menyelesaikan tugas



administrasi dibantu oleh tenaga kontrak yang seharusnya diperbantukan untuk pramubakti.

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2013 tentang kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil, bahwa seyogyanya setiap satuan kerja harus memiliki perhitungan angka kredit.

Hal ini sejalan dengan ketentuan KMA Nomor 143/KMA/SK/III/2007 tentang memberlakukan buku I, di dalam KMA tersebut secara rinci dan jelas ditentukan bagi setiap pengadilan, kebutuhan Hakim, Panitera di setiap kelas pengadilan. Maka setelah dilakukan Analisa beban kerja berdasarkan uraian jabatan dan tugas yang ada di Pengadilan maka dapat disimpulkan kebutuhan sumber daya manusia baik fungsional tertentu (Hakim dan pejabat Kepaniteraan) maupun fungsional umum (staf/administrasi), sebagai berikut:

- 1) Sub. Bagian PTIP pada Tingkat Pertama dibutuhkan staf sebanyak 6 (lima) orang.
- 2) Sub. Bagian Kepegawaian dan Ortala membutuhkan staf sebanyak 5 (enam) orang.
- 3) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- 4) Dan pada bagian Kepaniteraan diperlukan fungsional umum sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Jika dilihat dari data yang ada, baik tenaga teknis maupun non teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, sangatlah jauh dari ketentuan yang ada, sehingga kiranya dalam pengadaan **Calon Pegawai Negeri Sipil (ASN)** Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat di perioritaskan dalam mendapatkan Personel dikarenakan sangat sedikitnya personel yang ada di pengadilan Militer I-07 Balikpapan, hal ini sangatlah perlu menjadi perhatian agar tidak terjadinya pelayanan yang kurang maksimal kepada pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya, untuk mengatasi hal tersebut, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah memperdayakan tenaga kontrak yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan oleh PNS dan TNI dikerjakan oleh tenaga kontrak.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Pada tahun 2024 program Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang berhubungan dengan pencapaian kinerja, yaitu:

1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- b) terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

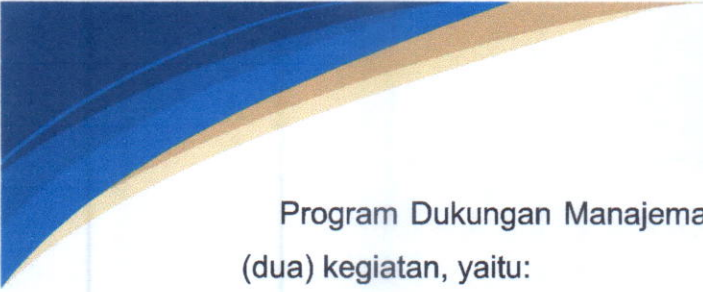
Program ini mencakup bagian kepaniteraan dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, yang dijabarkan menjadi beberapa rincian output sebagai berikut:

- a) Adanya perkara pidana yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- b) Adanya pelaksanaan sidang keliling ke wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

2) Program Dukungan Manajemen.

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

- a) Terwujudnya SDM peradilan yang berkompeten dibidang hukum dan peradilan.
- b) Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi SDM.
- c) Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan.
- d) Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.



Program Dukungan Manajemen mencakup bagian kesekretariatan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Kegiatan ini dijabarkan menjadi beberapa rincian output sebagai berikut:

Layanan Perkantoran.

Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretariat Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertanggungjawab terhadap pemenuhan seluruh kebutuhan operasional perkantoran baik kebutuhan dasar dan kebutuhan penunjang lainnya antara lain:

- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan;
- 2) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
- 3) Operasional kantor lainnya;
- 4) Pemeliharaan kendaraan;
- 5) Pencetakan dan penggandaan;
- 6) Sewa mesin fotokopi;
- 7) Pemeliharaan sarana kantor;
- 8) Pemeliharaan kendaraan dinas.

- b) Pengadaan Sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Layanan Dukungan Manajemen.

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana merupakan penunjang sebuah organisasi dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas kedinasan. Tersedianya sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi sarana dan prasarana satuan kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan belum seluruhnya memenuhi kebutuhan. Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana setiap tahunnya semakin bertambah. Penambahan sarana dan prasarana sangat menunjang dalam keberhasilan untuk pencapaian kinerja Sumber Daya Manusia.

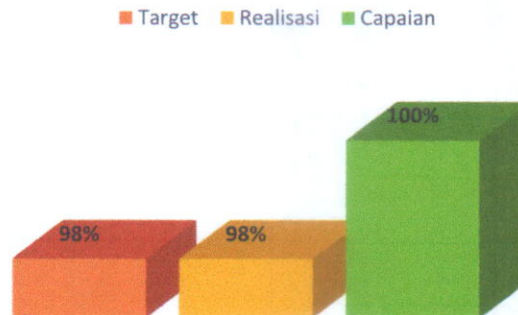
3. Presentase Penyelesaian Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, Perpustakaan Serta Pengelolaan Keuangan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan adalah sudah terpenuhi dan sesuai target. Adapun capaian target indikator tersebut digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	98%	98%	100%

GRAFIK PRESENTASE PENYELESAIAN PELAKSANAAN URUSAN SURAT MENYURAT, ARSIP, PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA, KEAMANAN, HUMAS, PERPUS, SERTA PELAPORAN TAHUN 2024



Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	98%	98%	100%

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan, dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Capaian persentase terlaksananya tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menggunakan aplikasi SIRATMIL dan mengimplementasikan peraturan Permenpan Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah terstandarisasinya sarana dan prasarana pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pada tahun 2024 pelaksanaan urusan keamanan, kebersihan, keprotokoleran dan humas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah terlaksana dengan baik.

Hal ini dapat dilihat dari adanya jadwal piket harian kebersihan kantor, jadwal piket keamanan kantor, SK penunjukkan keprotokoleran dan SK penunjukkan Humas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan.

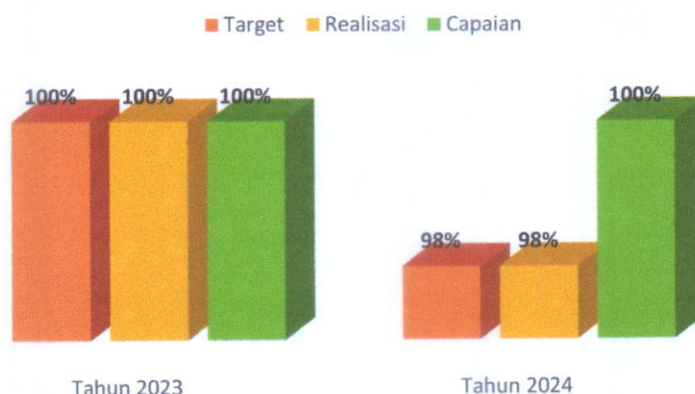
Berdasarkan data dan penjelasan tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan pada tahun 2024 telah tercapai dengan persentase capaian 100% (Seratus persen). Pencapaian target kinerja pada tahun 2024 telah terpenuhi dengan target 98% (Sembilan puluh delapan persen).

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2024, dengan tahun 2023.

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan. tahun 2024, dapat dilihat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian indikator kinerja yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dan pada tahun 2024, berikut adalah perbandingan pencapaian target kinerja sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Keterangan
	Tahun 2023			Tahun 2024			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	100%	100%	100%	98%	98%	100%	Persentase Pencapaian target terpenuhi

GRAFIK PERSENTASE PENYELESAIAN PELAKSANAAN URUSAN SURAT MENYURAT, ARSIP, PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA, KEAMANAN, KEPROTOKOLAN, HUMAS, PERPUS, SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2023-2024



	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100%	98%
Realisasi	100%	98%
Capaian	100%	100%

Bahwa pada tahun 2024 seluruh penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan sudah terlaksana dengan baik (100%).

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan pada tahun 2024 sudah mencapai Target jangka menengah dengan capaian realisasi 99%. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja			Keterangan
	Realisasi		Target Jangka Menengah	
	2023	2024		
Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	100%	98%	98%	Realisasi 2 tahun = (100%+98%)/2 = 99%

Bahwa pada tahun 2024 seluruh penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan sudah terlaksana dengan baik (100%).

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional.

Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2024 dengan target-target kinerja pada sasaran rencana strategis Mahkamah Agung 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional (Mahkamah Agung RI) Pengukuran Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
			2024	2024	2024	2024	
1.	Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	95%	100%	105,3%	Target tercapai
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	50%	75%	92,31%	124%	Target tercapai
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	85%	86,54%	101,81%	Target tercapai
		Index persepsi stakeholder	80%	95%	98%	103,16%	Target tercapai

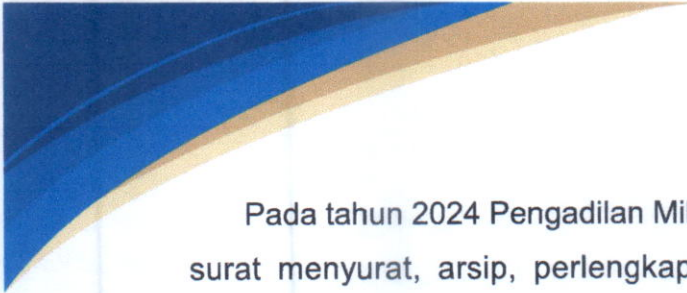
		yang puas terhadap layanan peradilan					
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	20%	100%	100%	100%	Target tercapai
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	90%	100%	111%	Target tercapai

Berdasarkan data pada tabel diatas hasil realisasi kinerja tahun 2024 Target kinerja pada indikator kinerja Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 apabila dibandingkan secara Nasional dengan target-target kinerja pada dokumen Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung telah tercapai.

e. Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja.

Target kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang direncanakan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Indikator Kinerja sasaran 4 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	97%	99,50%	102,58%
2.	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98%	98%	100%
3.	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98%	98%	100%



Pada tahun 2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menyelesaikan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya aplikasi surat menyurat (Aplikasi Siratmil), jadwal piket harian kebersihan Kantor, jadwal piket keamanan kantor, SK penunjukan keprotokolan dan SK penunjukan Hubungan Masyarakat Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Dengan demikian indikator kinerja Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan telah mencapai target yang ditetapkan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Kedudukan dan peran Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sangat penting, dimana Aparatur Peradilan sebagai sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Aparatur Peradilan Militer) yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang peradilan, sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien yang merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen Sumber Daya Manusia yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi. Dibidang Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, selaku instansi pengemban kekuasaan kehakiman di tingkat Pertama dalam sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (*excellence service*) demi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, maka sudah barang tentu kenyataan tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan profesionalisme kinerja aparatur peradilan Militer serta menjadi pengakselerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

Secara umum Sumber Daya Manusia Aparatur Peradilan Militer yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pembinaan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Per 31 Desember 2024 sebanyak 26 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2024

No	Satker	Type	Jumlah Personel			Ket.
			L	P	Jumlah	
1.	Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	A	20	6	26	

Salah satu kondisi yang dapat mendukung tercapainya manajemen SDM yang efektif dan efisien antara lain adanya komposisi pegawai yang profesional baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan komposisi SDM yang seimbang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa beban kerja yang ada, maka penyelesaian tugas pokok dan fungsi serta visi, misi dan tujuan lembaga bisa diarahkan dan dicapai dengan maksimal, demikian sebaliknya apabila komposisi tenaga SDM yang tidak seimbang akan menjadi preseden buruk dalam pencapaian visi dan misi lembaga.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berikut kami laporkan komposisi Sumber Daya Manusia Peradilan Militer di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dari beberapa aspek, sehingga dapat tergambar kondisi Sumber Daya Manusia yang ada apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum.

Tenaga Teknis Yustisial adalah Sumber Daya Manusia pada Peradilan yang memiliki peranan yang sangat strategis yang bertugas melaksanakan semua tugas teknis yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara, antara lain Kepala, Wakil Kepala, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti.

Pada tahun 2024 Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berjumlah 26 orang, terdiri dari tenaga teknis (Hakim dan Pejabat Kepaniteraan) berjumlah 11 orang, non teknis (Pejabat Struktural dan Administrasi) berjumlah 7 orang dan PPNP berjumlah 8 orang.

I. Teknis

No	Kelompok Jabatan	Jabatan	Jumlah (Personel)	Ket.
1.	Teknis	Kepala	1	TNI
		Wakil Kepala	-	-
		Pokkimmil	4	TNI
		Panitera	1	TNI
		Panmud Pidana	-	-
		Pengadmin Hukum (Staf)	-	-
		Pengadmin Reg Perkara (Staf)	-	-
		Pengelola Perkara (Staf)	2	TNI/ASN
		Analisis Perkara Peradilan (Staf)	-	-
		Panmud Hukum	-	-
		Pengadmin Hukum (Staf)	-	-
		Pengadmin Reg Perkara (Staf)	-	-
		Pengelola Data Informasi dan Hukum (Staf)	-	-
		Panitera Pengganti	3	TNI

II. Non Teknis

No	Kelompok Jabatan	Jabatan	Jumlah (Personel)	Ket.
2.	Non Teknis	Sekretaris	1	TNI
		Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	ASN
		Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Staf)	-	-
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Staf)	-	-
		Pengolah Data dan Informasi (Staf)	1	ASN (BP Ke Dilmil II-09 Bandung)
		Kasubbag Umum dan Keuangan	-	-
		Penyusun Laporan Keuangan (Staf)	-	-
		Bendahara (Staf)	1	ASN
		Pengelola daftar gaji	-	-
		Pengadministrasian Keuangan	1	ASN (Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan)
		Pengelola Barang Milik Negara (Staf)	-	-
		Pranata Barang dan Jasa (Staf)	-	-
		Pranata Kearsipan (Staf)	-	-
		Pengadmin Persuratan (Staf)	-	-
		Pengadmin Pustakawan (Staf)	-	-

	Teknisi Sarana dan Prasarana (Staf)	-	-
	Ajudan (Staf)	-	-
	Pengemudi (Staf)	-	-
	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	ASN
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (Staf)	-	-
	Analisis Kepegawaian	1	ASN
	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Staf)	-	-
	Pengelola Kepegawaian (Staf)	-	-

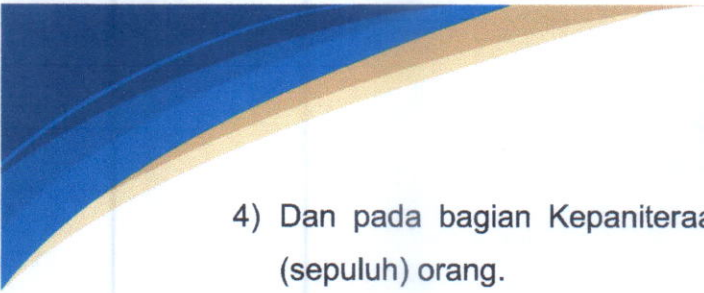
Tabel Sebaran SDM Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Berdasarkan *Job Description* masing-masing jabatan, apabila dibandingkan dengan jumlah dan jenis pekerjaan serta intensitas volume pekerjaan dengan SDM Pengadilan Militer I-07 Balikpapan masih banyak kekurangan terutama di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sehingga dalam menyelesaikan tugas administrasi dibantu oleh tenaga kontrak yang seharusnya diperbantukan untuk pramubakti.

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2013 tentang kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil, bahwa seyogyanya setiap satuan kerja harus memiliki perhitungan angka kredit.

Hal ini sejalan dengan ketentuan KMA Nomor 143/KMA/SK/III/2007 tentang memberlakukan buku I, di dalam KMA tersebut secara rinci dan jelas ditentukan bagi setiap pengadilan, kebutuhan Hakim, Panitera di setiap kelas pengadilan. Maka setelah dilakukan Analisa beban kerja berdasarkan uraian jabatan dan tugas yang ada di Pengadilan maka dapat disimpulkan kebutuhan sumber daya manusia baik fungsional tertentu (Hakim dan pejabat Kepaniteraan) maupun fungsional umum (staf/administrasi), sebagai berikut:

- 1) Sub. Bagian PTIP pada Tingkat Pertama dibutuhkan staf sebanyak 6 (lima) orang.
- 2) Sub. Bagian Kepegawaian dan Ortala membutuhkan staf sebanyak 5 (enam) orang.
- 3) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebanyak 10 (sepuluh) orang.

- 
- 4) Dan pada bagian Kepaniteraan diperlukan fungsional umum sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Jika dilihat dari data yang ada, baik tenaga teknis maupun non teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, sangatlah jauh dari ketentuan yang ada, sehingga kiranya dalam pengadaan **Calon Pegawai Negeri Sipil (ASN)** Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat di prioritaskan dalam mendapatkan Personel dikarenakan sangat sedikitnya personel yang ada di pengadilan Militer I-07 Balikpapan, hal ini sangatlah perlu menjadi perhatian agar tidak terjadinya pelayanan yang kurang maksimal kepada pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya, untuk mengatasi hal tersebut, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah memperdayakan tenaga kontrak yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan oleh PNS dan TNI dikerjakan oleh tenaga kontrak.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Pada tahun 2024 program Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang berhubungan dengan pencapaian kinerja, yaitu:

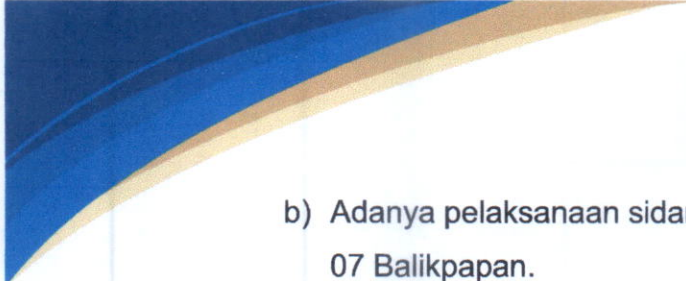
1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- b) terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Program ini mencakup bagian kepaniteraan dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, yang dijabarkan menjadi beberapa rincian output sebagai berikut:

- a) Adanya perkara pidana yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

- 
- b) Adanya pelaksanaan sidang keliling ke wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

2) Program Dukungan Manajemen.

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

- a) Terwujudnya SDM peradilan yang berkompeten dibidang hukum dan peradilan.
- b) Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi SDM.
- c) Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan.
- d) Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Program Dukungan Manajemen mencakup bagian kesekretariatan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Kegiatan ini dijabarkan menjadi beberapa rincian output sebagai berikut:

Layanan Perkantoran.

Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretariat Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertanggungjawab terhadap pemenuhan seluruh kebutuhan operasional perkantoran baik kebutuhan dasar dan kebutuhan penunjang lainnya antara lain:

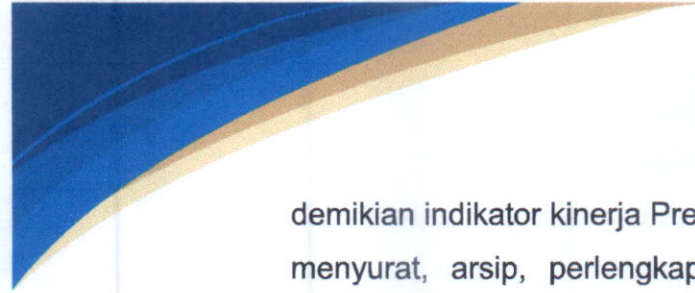
- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan;
- 2) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
- 3) Operasional kantor lainnya;
- 4) Pemeliharaan kendaraan;
- 5) Pencetakan dan penggandaan;
- 6) Sewa mesin fotokopi;
- 7) Pemeliharaan sarana kantor;
- 8) Pemeliharaan kendaraan dinas.

b) Pengadaan Sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Layanan Dukungan Manajemen.

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana merupakan penunjang sebuah organisasi dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas kedinasan. Tersedianya sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi sarana dan prasarana satuan kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan belum seluruhnya memenuhi kebutuhan. Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana setiap tahunnya semakin bertambah. Penambahan sarana dan prasarana sangat menunjang dalam keberhasilan untuk pencapaian kinerja Sumber Daya Manusia.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menyelesaikan laporan penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan selama tahun 2024 telah diselesaikan. Dengan



demikian indikator kinerja Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan telah mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian 100%.

B. Realisasi Keuangan

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang tepat sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan. Pada tahun anggaran 2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mendapat alokasi dana dari APBN yang tertuang dalam 2 (dua) DIPA yaitu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI dan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 dan penjabarannya tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-KL) satuan Kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Program kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 2 (dua) program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, antara lain sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

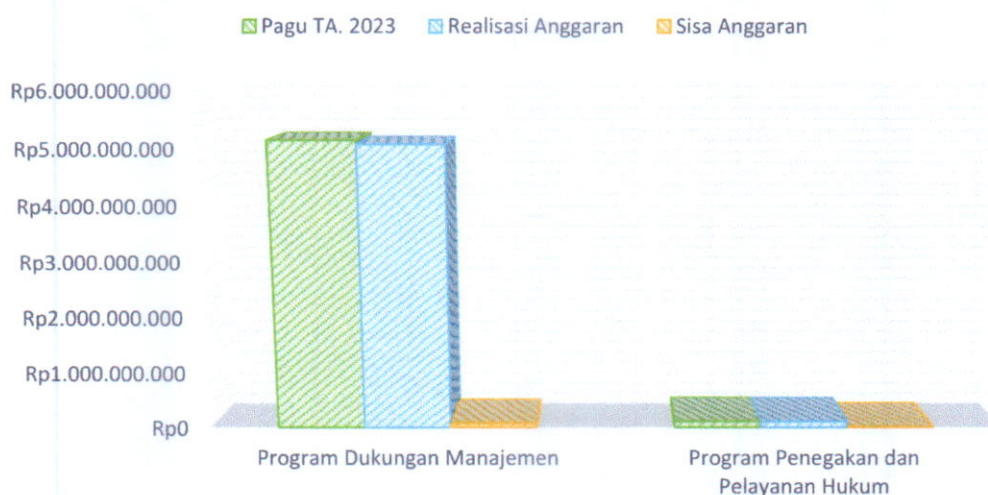
Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN Tahun 2024. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2024 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berdasarkan Revisi DIPA terakhir sebagai berikut:

**TABEL REALISASI ANGGARAN PROGRAM DIPA (01) BUA MARI
DAN DIPA (05) DITJEN BADILMILTUN MARI TAHUN 2024 PADA PENGADILAN
MILITER I-07 BALIKPAPAN**

No	Program Kerja	Pagu DIPA semula (Rp)	Pagu DIPA setelah revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen.	3.735.536.000	5.148.417.000	5.076.874.836	98,61	71.542.164
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	107.834.000	107.834.000	107.816.915	99,98	17.085

Sumber Data: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024

**GRAFIK REALISASI ANGGARAN PROGRAM DIPA
(01) BUA MARI DAN DIPA (05) DIRJEN
BADILMILTUN MARI TAHUN 2024 PADA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**



	Program Dukungan Manajemen	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Pagu TA. 2023	Rp5.148.417.000	Rp107.834.000
Realisasi Anggaran	Rp5.076.874.836	Rp107.816.915
Sisa Anggaran	Rp71.542.164	Rp17.085

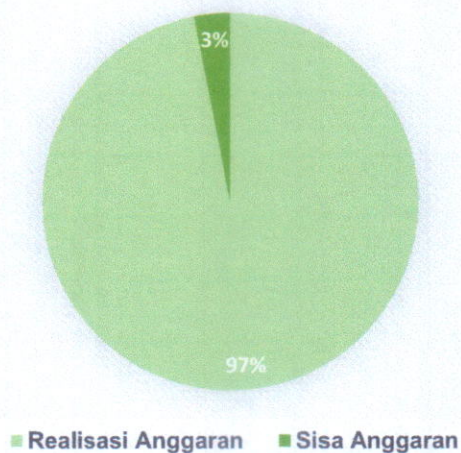
1. Pengelolaan keuangan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI.

a. Belanja Pegawai.

Data penyerapan anggaran Belanja Pegawai tahun 2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

No	Pagu DIPA (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1.	2.260.069.000	2.260.069.000	2.189.971.766	70.097.234	97

Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai

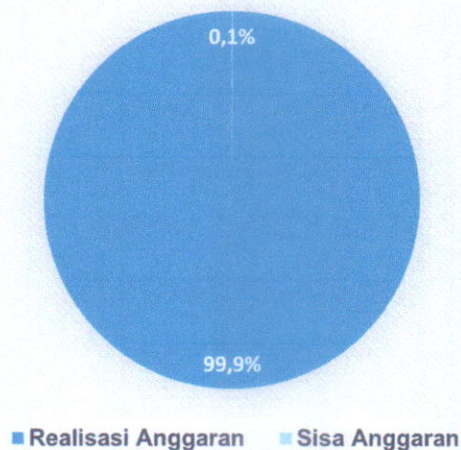


b. Belanja Barang.

Data penyerapan anggaran Belanja Barang tahun 2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

No	Pagu DIPA (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1.	1.475.467.000	1.584.367.000	1.583.909.159	457.841	99,97

Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Barang

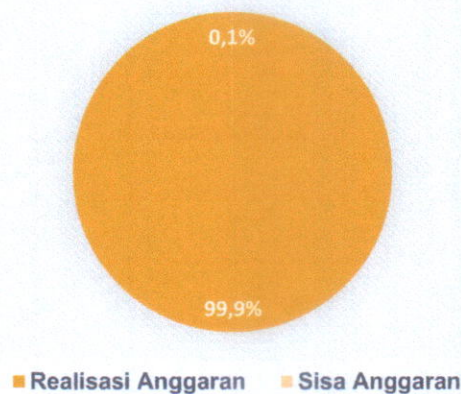


c. Belanja Modal

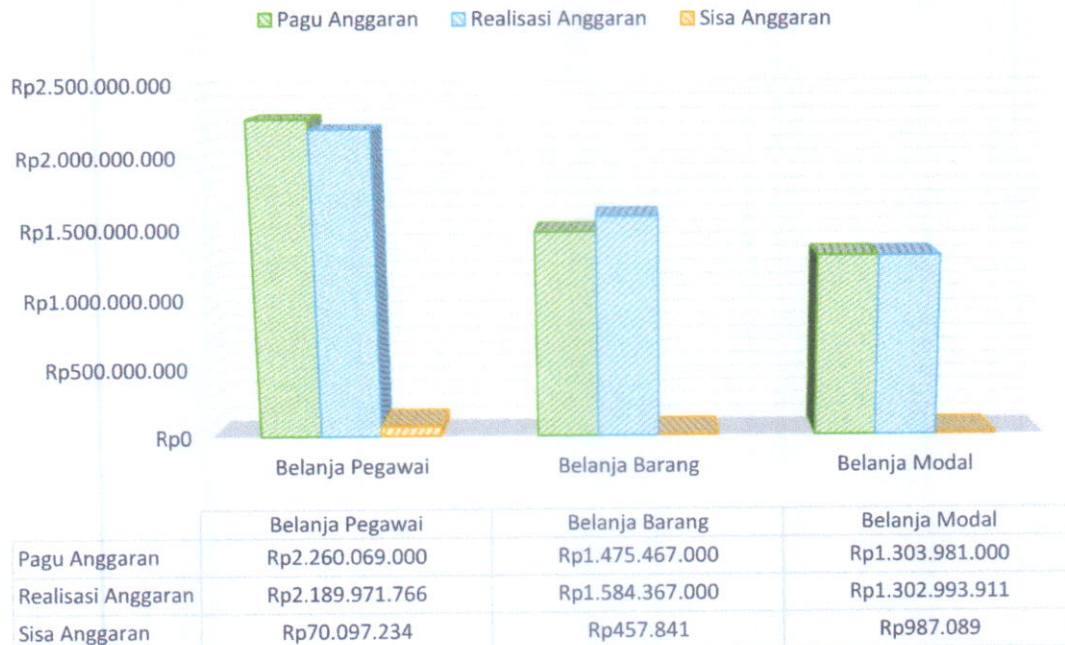
Data penyerapan anggaran belanja modal tahun 2024 Pengadilan Militer I-04 Balikpapan.

No	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1.	1.303.981.000	1.302.993.911	987.089	99,92

Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Modal



**GRAFIK REALISASI ANGGARAN PROGRAM
DUKUNGAN MANAJEMEN DIPA (01) BUA MARI
PADA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
TAHUN 2024**



Realisasi anggaran pada Program Dukungan Manajemen tahun 2024 ini sangat baik sekali dengan capaian persentase mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen), artinya pagu anggaran yang tersedia pada DIPA (01) dapat terserap dengan sangat baik sesuai kebutuhan dan akun belanja yang tersedia pada POK.

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa sisa anggaran terbesar terdapat pada belanja gaji dan tunjangan pegawai hal ini dipengaruhi adanya TPM mutasi Hakim pada tahun 2024 presentase penyerapan anggaran mencapai 97%, presentase penyerapan anggaran belanja barang mencapai 99.97%, sedangkan pagu belanja modal persentase penyerapan anggaran mencapai 99.92%.

2. Pengelolaan Keuangan DIPA 05 Ditjen Badilmiltun MARI.

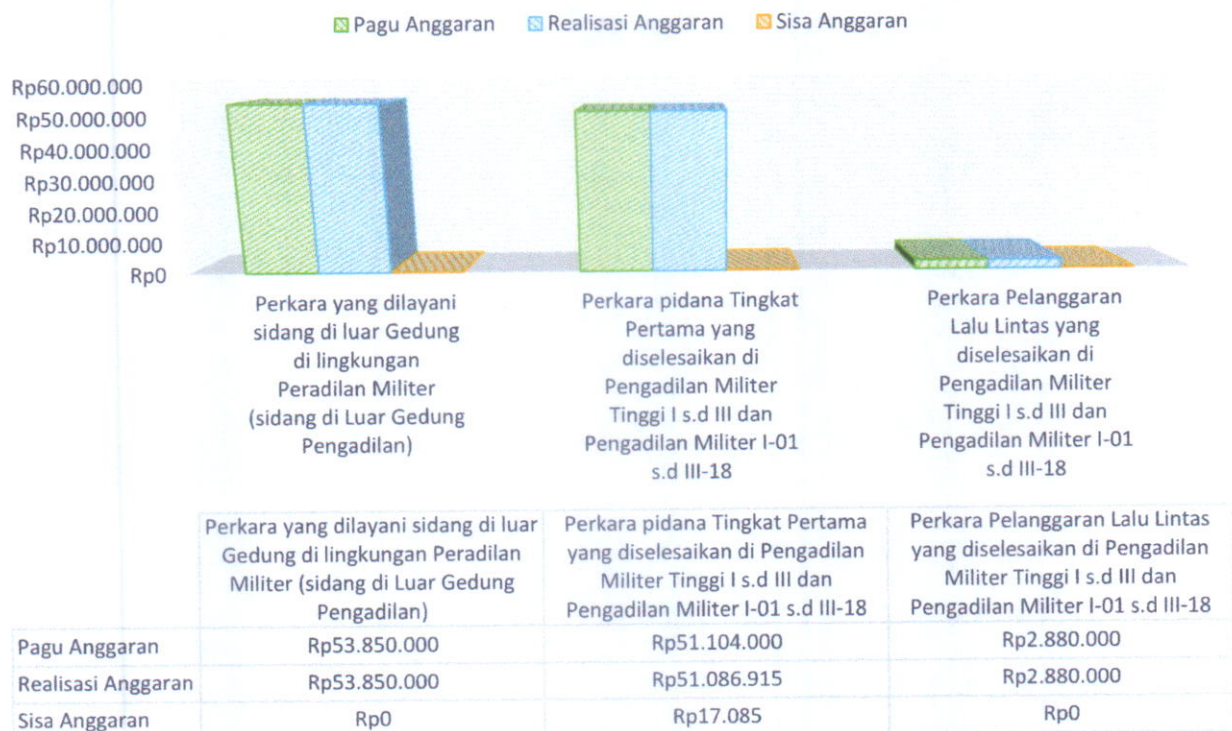
Pada program ini terdapat kegiatan peningkatan manajemen peradilan militer yang merupakan salah satu kegiatan yang terdapat pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI, pada tahun anggaran 2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 107.834.000,- (seratus tujuh juta

delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) adapun rincian realisasi anggaran pada program tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu semula (RP)	Pagu setelah revisi (RP)	Realisasi (RP)	(%)	Sisa Pagu (Rp)
1.	Perkara yang dilayani sidang di luar Gedung di lingkungan Peradilan Militer (sidang di Luar Gedung Pengadilan)	53.850.000	53.850.000	53.850.000	100	0
2.	Perkara pidana Tingkat Pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-18	51.104.000	51.104.000	51.086.915	99,97	17.085
3.	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-18	2.880.000	2.880.000	2.880.000	100	0
Total		107.834.000	107.834.000	107.816.915	99,98	17.085

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2024

GRAFIK REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM DIPA (05) PADA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TAHUN 2024



Pada program ini terdapat kegiatan peningkatan manajemen peradilan militer yang merupakan salah satu kegiatan yang terdapat pada DIPA (05) Ditjen



Badilmiltun MARI pada tahun anggaran 2024 terdapat 4 (empat) kali revisi anggaran. Revisi dilaksanakan dalam rangka optimalisasi anggaran dan perubahan rencana penarikan pada halaman III DIPA.

Realisasi anggaran pada program Penegakan dan Pelayanan Hukum terealisasi 99.99% (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh sembilan persen). Pada tahun 2024 penyerapan anggaran sudah mencapai angka yang sangat memuaskan karena pagu anggaran terserap hampir 100% (seratus persen) yaitu sebesar 99.99% (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh Sembilan persen).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan tindak lanjut atau respons atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan rencana strategis.

LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI secara garis besar, Dirjen Badilmitun MARI dan tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 ini secara umum, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan sangat baik, terdapat berbagai keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2024 diharapkan dapat memberikan suatu



gambaran tentang hasil capaian kinerja sasaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3. Adanya peningkatan kinerja Hakim dan Panitera serta Panitera Pengganti yang di dukung oleh kinerja staf administrasi dalam penyelesaian perkara. Unit kerja telah melakukan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimanfaatkan secara optimal, keadaan jumlah Majelis Hakim disesuaikan dengan rasio penanganan perkara.
4. Disiplin kerja seluruh aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja unit kerja.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan senantiasa menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota TNI dan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, seluruh aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berkomitmen untuk menghindari perilaku yang koruptif serta berupaya memberikan pelayanan yang bersih, profesional, akuntabel dan berprinsip pada nilai-nilai *good governance* serta dapat menjadi pemicu untuk meraih predikat WBK kedepannya.

B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Perlu adanya peningkatan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah di buat oleh seluruh Stakeholders.
3. Perlu adanya peningkatan keterlibatan Pimpinan dan seluruh Personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan didalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

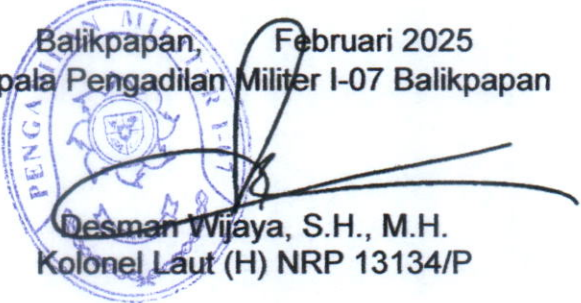
Instansi Pemerintah (SAKIP) agar target capaian kinerja dapat terpenuhi dengan maksimal.

4. Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan perlu peningkatan keterampilan dan kemampuan baik Hakim, pejabat Kepaniteraan, Panitera Pengganti dapat mengikuti pelatihan-pelatihan atau diklat secara berkesinambungan dan untuk pejabat dan staf potensial lainnya perlu juga mengikuti pelatihan-pelatihan, bimtek dan diklat baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

5. Perlu adanya penambahan Personel baik Militer maupun ASN untuk menunjang kinerja pada bagian kepaniteraan kiranya ada penambahan personil untuk mengisi jabatan yang masih kosong yakni jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana serta dibagian kesekretariatan jabatan Kasubbag Umum dan Keuangan yang masih kosong sementara diisi oleh PNS Golongan III sebagai Plt. Kasubang Umum dan Keuangan. Selain itu perlu pula penambahan personil Bintara dan Tamtama TNI sebagai Provos, serta penambahan personil ASN terutama yang memiliki kemampuan dan pendidikan di bidang Teknologi Informasi atau Teknik Komputer. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang IT tersebut sangat diperlukan untuk mendukung kinerja pelayanan Pengadilan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Balikpapan, Februari 2025
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1. Struktur Organisasi**
- 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)**
- 3. Reviu Matriks Renstra 2020-2024**
- 4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026**
- 5. Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025**
- 6. Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2024**
- 7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024**
- 8. Kerangka Pendanaan**
- 9. Realisasi Anggaran DIPA (01) BUA MARI dan Realisasi Anggaran DIPA (5) Dirjen Badilmiltun**
- 10. Rapat Penyusunan LKjIP**
- 11. Pernyataan telah direviu**
- 12. Ceklis Reviu**
- 13. Rapat Reviu LKjIP**

Lampiran I

➤ Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi



Lampiran 2

➤ Indikator Kinerja Utama (IKU)

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Nomor : 47/KPM.W1-MIL.07/SK.KP 3.4.1/XII/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSAKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dalam menyusun rencana kinerja, perjanjian kinerja dan penyusunan laporan kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 27 Desember 2024

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Kolonel laut (H) Desman Wijaya



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kadilmilti I-Medan.
2. Hakim Pengawas Bidang Dilmil I-07 Balikpapan.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I - 07 BALIKPAPAN**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Perkara pidana/Kejahatan dan Pelanggaran lalu lintas.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.		c. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Stakeholder Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 - Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Triwulan
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (Penyidik POM) dan Ankum sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Papera; Perwira Penyerah Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			• Odml : Oditur Militer. • PM : Polisi Militer • Ankum : Atasan yang berhak menghukum.		
6.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terolnggirkan	Persentase Perakra yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	<u>Jumlah Perkara Yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</u> X100% <u>Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan diluar gedung pengadilan</u> Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perakra yang telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perakra yang direncakan untuk disidangkan (dirensidkan).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Lampiran 3

- Matriks Renstra 2020-2025 dan
- Rancangan Matriks Renstra 2025-2029

➤ **Matriks Renstra 2020-2025**

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2025
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

INSTANSI : Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 VISI : Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung
 MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 2. Meningkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan, Profesionalisme Tenaga Teknis dan Non Teknis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran Strategis		Target					
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95	95	95	95	95	95
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	75		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90	90	90	75	75	75
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum	85		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum	90	90	90	85	85	85
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	95		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	95	95	95	95
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	90	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100	100	100	90	90	90

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran Strategis		Target					
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.	97	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.	100	100	100	97	97	97
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	100	100	100	98	98	98
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	100	100	100	98	98	98

➤ Rancangan Matriks Renstra 2025-2029

RANCANGAN MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

INSTANSI : Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
VISI : Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
2. Meningkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan, Profesionalisme Tenaga Teknis dan Non Teknis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis			2025		2026		2027		2028		2029	
	Uraian	Indikator Kinerja		Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)
1.	Terwujudnya peradilan yang adil, transparan dan akuntabel	Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	95%								Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer		95 Perkara	157.085	95 Perkara	329.181	95 Perkara	329.181	95 Perkara	329.181	95 Perkara	329.181
												Perkara Pidana Tingkat Pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan		95 Perkara	103.230	95 Perkara	273.681	95 Perkara	215.000	95 Perkara	215.000	95 Perkara	215.000
						Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%		Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan	70 Perkara	1003.310	70 Perkara	215.000	70 Perkara	215.000	70 Perkara	215.000	70 Perkara	215.000
						Persentase perkara Penanganan lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Perkara Penanganan Lalu Lintas yang diselesaikan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	Jumlah perkara lalu lintas yang diselesaikan	25 Perkara	2.925	25 Perkara	2.925	25 Perkara	2.925	25 Perkara	2.925	25 Perkara	2.925
						Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	75%	75%	75%	75%	75%		Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	48 Perkara	4.200	48 Perkara	15.000	48 Perkara	15.000	48 Perkara	15.000	48 Perkara	15.000
						Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	85%	85%	85%	85%	85%		Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50 Perkara		50 Perkara		50 Perkara		50 Perkara		50 Perkara	

													Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%		Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.	70 Perkara	22.400	70 Perkara	40.000	70 Perkara	40.000	70 Perkara	40.000	70 Perkara	40.000
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	90%		Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	90%	90%	90%	90%	90%		Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plats	10 Perkara	53.850	10 Perkara	78.750	10 Perkara	98.750	10 Perkara	118.750	10 Perkara	128.750

Lampiran 4

➤ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026

4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85 %
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90%
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi, evaluasi dan dokumentasi serta informasi dan statistik serta pemantauan pelaporan	97 %
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98 %
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98 %

Balikpapan, 2 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Desman Wijaya, S.H.,M.H.

Kolonel Laut (H) NRP13134/P

Lampiran 5

➤ Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2025

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desman Wijaya, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi - I Medan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan



Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85 %
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90 %
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	97 %
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98 %
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98 %

Kegiatan

Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Rp. 55.000.000
2. Program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Rp. 3.846.926.000

Pihak Kedua
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Balikpapan, 2 Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Lampiran 6

➤ Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

6. Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2024

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95%	100%	105,3%	➤ Pendaftaran Berkas Perkara tepat waktu.
						➤ Penetapan Hari Sidang tepat waktu.
						➤ Penyelesaian persidangan perkara tepat waktu.
						➤ Penyelesaian perkara minutasi/Upaya Hukum tepat waktu.
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	75%	92,31%	124%	➤ Penyelesaian perkara tepat waktu
						➤ Minutasi/Upaya Hukum tepat waktu
						➤ Meningkatkan kompetensi Hakim dalam membuat putusan melalui Bimtek
		Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	85%	86,34%	101,81%	➤ Penyelesaian perkara tepat waktu
						➤ Minutasi/Upaya Hukum tepat waktu
						➤ Meningkatkan kompetensi Hakim dalam membuat putusan melalui Bimtek
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%	98%	103,16%	➤ Mengumpulkan data responden pada aplikasi Survey.
						➤ Membuat laporan secara berkala
						➤ Meningkatkan kualitas putusan yang berkeadilan
						➤ Meningkatkan fasilitas bagi pencari keadilan
						➤ Meningkatkan akses pelayanan publik melalui SIPP dan tersedia meja informasi dan Direktori Putusan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	➤ Pendaftaran Berkas Perkara tepat waktu
						➤ Penetapan Hari Sidang tepat waktu
						➤ Penyelesaian persidangan perkara tepat waktu.
						➤ Pengiriman petikan putusan/Salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
						➤ Penyelesaian perkara minutas/Upaya Hukum tepat waktu.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	90%	100%	111%	➤ Pendaftaran berkas perkara tepat waktu
						➤ Penetapan hari sidang tepat waktu
						➤ Pesidangan di luar gedung pengadilan sesuai rensid tepat waktu
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	97%	99,50%	102,58%	➤ Melaksanakan Penyusunan Rencana Anggaran lengkap dan tepat waktu
						➤ Menyusun Program Kerja
						➤ Menyusun Dokumen SAKIP dan LKE AKIP
						➤ Melaksanakan Implementasi teknologi Informasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98%	98%	100%	➤ Melaksanakan administrasi kepegawaian ➤ Melaksanakan pengelolaan data pegawai ➤ Meningkatkan kualitas mutu dan kompetensi SDM non takenis ➤ Meningkatkan kualitas pegawai melalui promosi, rotasi dan mutasu kepegawaian ➤ Melaksanakan ketentuan disiplin hakim dan Pegawai serta pemberian reward dan punishment
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98%	98%	100%	➤ Melaksanakan tata persuratan, kearsipan dan penggandaan ➤ Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat ➤ Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor ➤ Menyusun Rencana Penggunaan Anggaran ➤ Melaksanakan panatausahaan anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 ➤ Melaksanakan Realisasi dan pertanggungjawaban anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 ➤ Melaksanakan pelaporan keuangan

Balikpapan, 2 Januari 2025
Kepala Pengadilan Militer I/07 Balikpapan

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Koloeni Laut (H) NRP 13134/P

Lampiran 7

➤ SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2024

7. SK Tim Penyusunan Laporan LKjlp Tahun 2024



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Nomor : 36 /KPM .W1.Mil07/SK.OT/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TAHUN 2024

KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

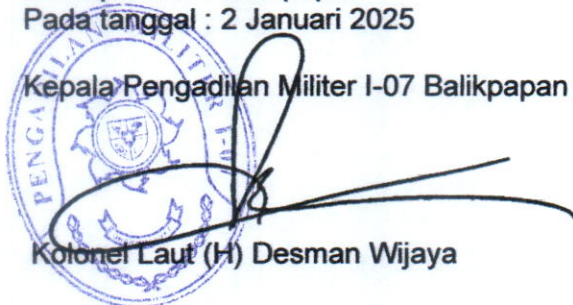
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024.
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisakan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari 2025;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPATA 2025;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



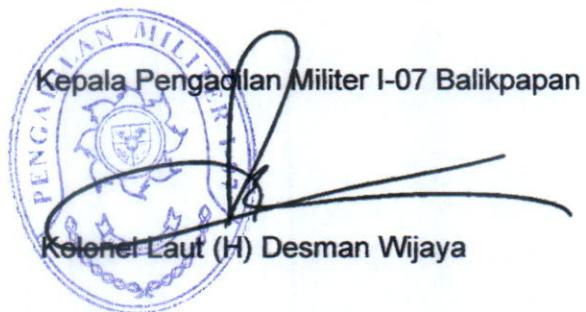
Kolonel Laut (H) Desman Wijaya

Lampiran I Keputusan Kadilmil I-07 Balikpapan
Nomor : 36 /KPM .W1.Mil07/SK.OT/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

No	Jabatan	Nama
1.	Penanggungjawab	Kolonel Laut (H) Desman Wijaya, S.H.,M.H.
2.	Koordinator Validasi Data	Letkol Chk Dendi Sutyoso,S.S.,S.H
3.	Ketua	Mayor Chk Mahpul Saepuloh,S.H.
4.	Sekretariat	Lettu Chk Herman,S.H.
5.	Anggota	1. ASN. Sarengat 2. ASN. Sri Handajani 3. ASN. Sugeng Nuraini 4. ASN. Andi Satriyawan,A.Md.AB 5. PPNNP. Aloysia Maria W.D,S.Kom
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Serma Fikriansyah,S.H. 2. ASN. Ryan Fernando, S.Sos. 3. ASN. Indri Niswanti,A.Md.AB 4. PPNNP Muhammad Subky,S.H. 5. PPNNP Rendy Pramana Putra,S.Kom

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



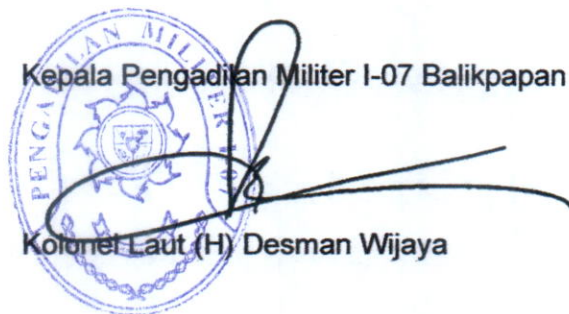
Kolonel Laut (H) Desman Wijaya

Lampiran II Keputusan Kadilmil I-07 Balikpapan
Nomor : 36 /KPM .W1.Mil07/SK.OT/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

No	Jabatan	Nama
1.	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretariat	Menkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Esselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

The image shows a circular official stamp of the Military Court I-07 Balikpapan. The stamp contains the text 'PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a large, bold, handwritten signature in black ink.

Kolonel Laut (H) Desman Wijaya

Lampiran 8

- Matriks Kerangka Pendanaan 2020-2025 dan
- Rancangan Matriks Kerangka Pendanaan 2025-2029

➤ Matriks Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2025

Matrik Kerangka Pendanaan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020-2025

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target						Pendanaan					
			Prakiraan Maju						Prakiraan maju					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum									65.420.000	98.809.000	103.600.000	110.840.000	107.834.000	157.085.000
1058. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	1058 BCA Perkara Hukum Perseorangan	001.Pihak berpekara yang dilayani melalui sidang diluar Gedung di Pengadilan Militer	10 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	48.600.000	48.600.000	48.600.000	48.600.000	53.850.000	53.850.000
		U03. Perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-19	81 PKR	81 PKR	93 PKR	136 PRK	105 PKR	70 PKR	168.20.000	48.209.000	55.000.000	62.240.000	53.984.000	100.310.000
Program Dukungan Manajemen									3.626.518.000	3.498.465.000	4.151.315.000	4.407.106.000	3.735.536.000	3.901.926.000
1071.Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1071.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	053. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	-	-	-	-	-	6 unit	-	-	-	-	-	55.000.000
6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	6986.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	051.Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	700.000
		001. Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.457.524.000	2.042.6320000	2.502.632.000	2.502.632.000	2.260.069.000	3.845.926.000
	6986.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	051. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	300.000

➤ Rancangan Metrik Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029

Rancangan Matrik Kerangka Pendanaan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2025-2029

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Pendanaan				
			Prakiraan Maju					Prakiraan maju				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum								157.085.000	207.125.000	237.125.000	267.125.000	287.125.000
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Perkara Hukum Perseorangan	Pihak berpekara yang dilayani melalui sidang diluar Gedung di Pengadilan Militer	10 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	53.850.000	78.750.000	98.750.000	118.750.000	128.750.000
		Perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-19	70 PKR	70 PKR	80 PKR	85 PKR	95 PKR	100.310.000	125.450.000	135.450.000	145.450.000	155.450.000
Program Dukungan Manajemen								3.901.926.000	26.596.926.000	26.596.926.000	26.596.926.000	26.596.926.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	6 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	55.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.845.926.000	3.845.926.000	3.845.926.000	3.845.926.000	3.845.926.000
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengadaan Kendaraan Dinas (Mobil dan Motor)	-	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	-	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
		Pengadaan Perangkat Komputer	-	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	-	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000
		Pengadaan Renofasi Gedung (Perbaikan Ruang Kerja yang kurang)	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000

Lampiran 9

- Realisasi Anggaran DIPA (01) BUA MARI
- Realisasi Anggaran DIPA (05)
Dirjen Badilmiltun

8. Rekapitulasi Realisasi Anggaran DIPA (01) BUA Mahkamah Agung RI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
 JL. SYARIFUDDIN YONES NO. 39 RT.11 RW.00, SEPINGGAN RAYA,
 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id, balikpapan.dilmil07@gmail.com.

Rekapitulasi Realisasi Anggaran DIPA (01) BUA Mahkamah Agung RI
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

NO	SATKER	PAGU SEMULA	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI		SISA DANA	
				Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.260.069.000	2.260.069.000	2.189.971.766	96,90	70.097.234	96,90
2.	Belanja Operasional Perkantoran	1.475.467.000	1.584.367.000	1.551.309.159	99,97	457.841	99,97
3.	Belanja Modal	-	1.303.981.000	1.302.993.911	99,92	987.089	99,92
Total		3.735.536.000	5.148.417.000	5.076.874.836	98,61	71.542.164	98,61

Balikpapan, 2 Januari 2025



Sekretaris/KPA

Hery Pujiyanto, S.H.
 Mayor Chk NRP2920087520571



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YONES NO. 39 RT.11 RW.00, SEPINGGAN RAYA,
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id, balikpapan.dilmil07@gmail.com.

Rekapitulasi Realisasi Anggaran DIPA (05) Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

No	Kegiatan	Pagu semula (RP)	Pagu setelah revisi (RP)	Realisasi (RP)	(%)	Sisa Pagu (Rp)
1.	Perkara yang dilayani siding di luar Gedung di lingkungan Peradilan Militer (sidang di Luar Gedung Pengadilan)	53.850.000	53.850.000	53.850.000	100	0
2.	Perkara pidana Tingkat Pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-18	51.104.000	51.104.000	51,086,915	99,97	17,085
3.	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-18	2.880.000	2.880.000	2.880.000	100	0
Total		107.834.000	107.834.000	107.816.915	99,98	17.085

Balikpapan, 2 Januari 2025

Sekretaris/KPA



[Signature]
Hery Pujiyanto, S.H.
Mayor Ckk NRP2920087520571

Lampiran 10

➤ Rapat Penyusunan LKjIP

10. Rapat Penyusunan LKJIP



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

Balikpapan, 27 Desember 2024

Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada

Yth. Tim Penyusun LKjIP Dilmil I-07 Balikpapan

di

Tempat

Dengan Hormat.

Bersama ini kami mengundang Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk menghadiri rapat, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Desember 2024
Jam : 14.00 Wita s/d Selesai
Pakaian : Pakaian yang berlaku pada hari itu.
Tempat : Ruang Command Center Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
Acara : Rapat Penetapan IKU, Reviu Renstra 2020-2024 dan
Penyusunan LKjIP 2024.

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Sekretariat

Letu Ckr Herman



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

NOTULA

Dasar : Undangan Rapat dari Sekretaris Dilmil I-07 Balikpapan untuk Tim
Penyusun LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
Tanggal : Jum'at, 27 Desember 2024
Pukul : 14.00 Wita
Tempat : Ruang Command Center Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
Acara : Rapat Penetapan IKU, Reviu Renstra 2020-2024 dan
Penyusunan LKjIP 2024.
Peserta Rapat : Seluruh Tim Penyusunan LKjIP 2024.

Jalannya rapat/pertemuan :

Rapat dibuka oleh Kadilmil I-07 Balikpapan pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024
adapaun Hasil rapat Penetapan IKU, Reviu Renstra 2020-2024 dan Penyusunan LKjIP 2024
oleh Tim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama 2024 mengikuti IKU yang telah ditetapkan oleh Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan IKU pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, dengan diberlakukannya ketetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 47/KPM.W1.Mil07/SK.KP3.4.1/XII/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;
2. Reviu Renstra ditambahkan indikator kerja bagian Kesekretariatan;
3. Tim LKjIP segera menyusun laporan kinerja instansi perintah TA 2024 dan semua bagian yang terkait saling berkoordinasi agar data yang disajikan adalah benar/valid.

Notulensi

Aloysia Maria Wahyu Widianingsih, S.Kom.

Mengetahui

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Kolonel Laut (H) Desman Wijaya

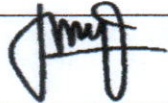
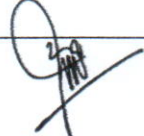


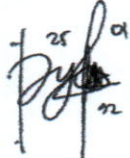
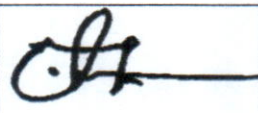
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

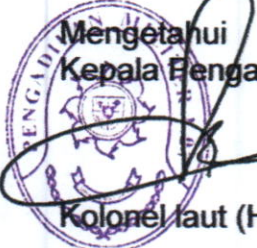
Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

ABSENSI

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Desember 2024
Perihal : Rapat Penyusunan LKjIP 2024

NO	NAMA/ PANGKAT/ NRP / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	Kolonel Laut (H) Desman Wijaya, S.H., M.H. 13134/P	Kadilmil (Penanggung jawab)		
2.	Letnan Kolonel Chk Dendi Sutiyoso.S.S.,S.H NRP 21940113631072	Pokkimil Gol. V (Koordinator Validasi Data)		
3.	Mayor Chk Mahpul Saepuloh, S.H. NRP 21940135670972	Panitera (Ketua)		
4.	Lettu Chk Herman,S.H NRP 21060076730384	Panitera Pengganti (Sekretariat)		
5.	ASN Sarengat NIP 196910231991031005	Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan (Anggota)		
6.	ASN Sri Handajani NIP 196910231991031005	Kasubag PTIP (Anggota)		
7.	ASN Sugeng Nuraini NIP 197306201998031003	Kasubag. Kepegawaian dan Tata Laksana (Anggota)		
8.	ASN Andi Satriyawan,A.Md.AB NIP 199506252020121007	Klerek Penelaah Teknis Kebijakan (Anggota)		
9.	Serma Fikriansyah,S.H NRP 2106007699784	Pengelola Perkara (Tim Reviu LKjIP)		

10.	ASN Ryan Fernando, S.Sos. NIP 199201252019031006	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama (Tim Reviu LKjIP)		
11.	Indri Niswanti, A.Md.A.B. 199909202022032004	Klerik Pengelola Penanganan Perkara (Tim Reviu LKjIP)		
12.	Rendy Pratama Putra, S.Kom.	PPNPN (Tim Reviu LKjIP)		
13.	Aloysia Maria Wahyu Widianingsih, S.Kom.	PPNPN (Anggota)		
14.	Muhammad Subky, S.H.	PPNPN (Tim Reviu LKjIP)		



 Mengetahui
 Kepala Pengadilan Militer I-07

 Kolonel Laut (H) Desman Wijaya

Sekretariat

 Lettu Chk Herman



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

DOKUMENTASI



Lampiran 11

➤ Pernyataan Telah Di Reviu

11. Pernyataan telah direviu.

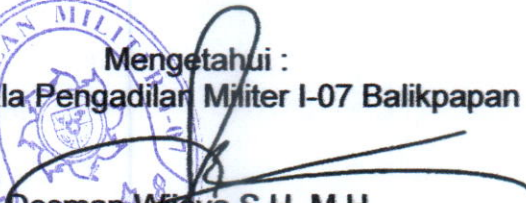
Lampiran III
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 Juli 2023

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU ATAS
LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

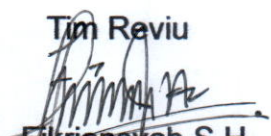
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Mengetahui :
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Balikpapan, 19 Februari 2025

Tim Reviu

Fikriansyah, S.H.
Serma NRP 2106007699784

Lampiran 12

➤ Ceklis Reviu

12. Ceklis Reviu

Lampiran II
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 Juli 2023

CHEKLIST REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

NO	PERNYATAAN		CHEKLIST
1.	Format	1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	√
		2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja.	√
		3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja instansi Pemerintah yang memadai.	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP di susun oleh unit kerja yang memiliki tugas pokok fungsi untuk itu.	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah di dukung dengan data yang memadai.	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja.	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data dan informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya.	√
		6. Analisis atau penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	√

NO	PERNYATAAN		CHEKLIST
		7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawah	√
3.	Substansi	1. Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		2. Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis.	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		4. Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Indikator Kinerja.	√
		5. Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		8. IKU dan indikator kinerja telah cukup mengukur tujuan dan sasaran.	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		10. IKU dan indikator kinerja telah SMART.	√

Lampiran 13

➤ Rapat Reviu LKjIP

13. Rapat Reviu LKjIP.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt. 11 Rw. 00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id, balikpapan.dilmil07@gmail.com.

Balikpapan, 19 Februari 2025

Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada

Yth. Tim Reviu LKjIP Dilmil I-07 Balikpapan

di

Tempat

Dengan Hormat.

Bersama ini kami mengundang Tim Reviu LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk menghadiri rapat, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Februari 2025
Jam : 10.00 Wita s/d Selesai
Pakaian : Pakaian yang berlaku pada hari itu.
Tempat : Ruang Command Center Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
Acara : Rapat Reviu LKjIP 2024.

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Ketua Tim Reviu LKjIP Dilmil I-07

Serna Fikriansyah



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

**Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.**

NOTULA

Dasar : Undangan Rapat dari Ketua Tim Reviu LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
Hari : Rabu
Tanggal : 19 Februari 2025
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
Acara : Rapat Reviu LKjIP 2024

Peserta Rapat : Seluruh Tim Reviu LKjIP 2024.

SUSUNAN ACARA RAPAT

1. Pembukaan oleh Ketua Tim Reviu LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Rapat Reviu LKjIP 2024.
3. Penutup oleh Ketua Tim Reviu LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

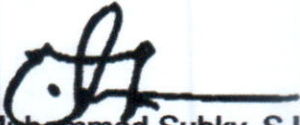
HASIL RAPAT

Laporan Reviu LKjIP 2024 oleh Tim Reviu Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah;
2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja;
3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja instansi Pemerintah yang memadai;
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan;
6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan;
7. LKjIP di susun oleh unit kerja yang memiliki tugas pokok fungsi untuk itu;
8. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah di dukung dengan data yang memadai;
9. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja;
10. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja;
11. Data dan informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya;
12. Analisis atau penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait;
13. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bulanan merupakan gabungan;
14. Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam perjanjian kinerja;
15. Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis;

16. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai;
17. Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Indikator Kinerja;
18. Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Indikator Kinerja Utama;
19. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai;
20. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;
21. IKU dan indikator kinerja telah cukup mengukur tujuan dan sasaran;
22. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai;
23. IKU dan indikator kinerja telah SMART.

Notulis



Muhammad Subky, S.H.



Ketua Tim

Sema Fikriansyah, S.H



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

ABSENSI

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Februari 2025
Perihal : Rapat Reviu LKjIP 2024

NO	NAMA/ PANGKAT/ NRP / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	Serma Fikriansyah, S.H NRP 2106007699784	Pengelola Perkara (Tim Reviu LKjIP)		
2.	ASN Ryan Fernando, S.Sos. NIP 199201252019031006	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama (Tim Reviu LKjIP)		
3.	Indri Niswanti, A.Md.A.B. 199909202022032004	Klerik Pengelola Penanganan Perkara (Tim Reviu LKjIP)		
4.	Rendy Pratama Putra, S.Kom.	PPNPN (Tim Reviu LKjIP)		
5.	Muhammad Subky, S.H.	PPNPN (Tim Reviu LKjIP)		

Balikpapan, 19 Februari 2025
Ketua Tim Reviu LKjIP

Serma Fikriansyah, S.H



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

DOKUMENTASI

